

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Februari | Tahun 2022 No. 28

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mardani, M.Eng.

Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) Tidak Etis dan Serampangan





IKN dan Inkonsistensi

Pemindahan ibu kota negara bukanlah semata persoalan memindahkan epicentrum kegiatan kenegaraan kepada suatu daerah, tapi dia juga bicara tentang bagaimana melibatkan publik sebanyak-banyaknya. Karena pemilik saham terbesar adalah rakyat

Kita sempat berprasangka baik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terjadi cacat formil terhadap undang-undang Cipta kerja, maka sejak saat itu tidak ada lagi pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terburu-buru, tergesa-gesa dan terabas-terabas pembentuk UU. UU Cipta kerja setelah di "ketok" lebih dari lima kali koreksi dan revisi. Sebuah cela sejarah dalam proses monumental bernegara. Setelah itu kita berharap akan lebih hati-hati, cermat dan seksama.

Harapan tak kunjung datang, justru cemas semakin menderu karena di undang-

undang ibukota negara kita menyaksikan sesuatu yang lebih dahsyat, dimana satu undang-undang dikerjakan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, padahal di dalamnya berkonsekuensi pada pengorbanan dana, waktu, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Karena apa yang didiskusikan, diperdebatkan dan diputuskan jauh berbeda dengan kesimpulan akhir. FPKS Berusaha keras mengingatkan agar STOP, kita sedang pandemi dan berjuang dalam ekonomi. Tok UU IKN!

Kehendak hadirkan IKN di masa pandemi tidak ada yang berkurang dari prosesnya

karena semua bertambah, baik kuasa maupun realita; luasan lahan bertambah dari 180 ribu ha di rencana awal, saat ini menjadi sekitar 256 ribu ha, awalnya janji tidak bebani Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), faktanya menggunakan dan hampir saja gunakan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Ada lagi yang bikin terperanjat setelah palu diketok, kuasa perencanaan tidak tahu bahwa di dalam IKN Ada Konsesi Tambang. Tidakah juga tahu bahwa ada data 149 lubang bekas tambang? itu yang terlihat. Tidakah tahu juga bahwa ada banyak "lubang-

lubang" lain di sisi kebijakan publik; bencana lingkungan hidup, inkonstitusional satatus IKN, potensi beban keuangan, kerentanan pertahanan dan keamanan, mobilisasi aparat sipil negara (ASN), dan banyak hal lain. Tok! 16 jam lebih dari cukup untuk menuntaskan itu.

Memang perdebatan di dalam pembahasan undang-undang ibukota negara terjadi, partisipasi publik dilakukan, kajian akademis tersedia, Tapi itu semua seperti sebuah hal yang memang harus dilalui atau prosedur semata. Prasyarat minimal, tanpa substansi yang jauh dari optimal.

sisanya biarkan publik

berpolemik dan berprotes, toh merasa pada akhirnya bisa diselesaikan dengan pendeng-
ung yang berargumentasi 'lun-
tang lantung' dan 'sekenanya'.

Kita patut merasa prihatin ketika kehendak yang memak-
sakan kehendak. Bertalu-talu
jadi tumpukan masalah.

Pemindahan ibu kota
negara bukanlah semata
persoalan memindahkan
epicentrum kegiatan
kenegaraan kepada suatu
daerah, tapi dia juga bicara
tentang bagaimana melibatkan
publik sebanyak-banyaknya.
Karena pemilik saham terbesar
adalah rakyat.

Tolak RUU IKN, Aleg PKS Nilai Pemindahan **Berpotensi** Langgar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan secara tegas menyatakan menolak pengesahan RUU Ibukota Negara (IKN).

Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU IKN di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta (18/1).

Johan mengingatkan Pemerintah bahwa rencana pemindahan IKN memiliki masalah terbesar pada aspek lingkungan terutama pembangunan kota yang berakibat merusak fungsi hutan, merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati.

"Kondisi saat ini menunjukkan 59,5% luas wilayah IKN merupakan wilayah Kawasan hutan dan sebagai wilayah habitat satwa endemik yang harusnya dilindungi", terangnya.

Politisi PKS ini menyatakan menolak pemindahan IKN karena sampai saat ini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi IKN.

"Saya menghimbau Pemerintah harus sadar bahwa pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan membuat Sebagian daratan mengalami degradasi dan berpotensi mengakibatkan banjir besar, dan faktanya banjir pun sudah terjadi saat ini di lokasi tersebut," imbuhan Johan.

Demikian juga dengan potensi bencana kabut asap di lokasi IKN, imbuhnya, dimana terdapat 1.106 titik panas api yang pernah membuat kebakaran hutan dan lahan

secara hebat seluas 6.715 ha pada tahun 2019 lalu.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mempertanyakan keabsahan dan kualitas kajian lingkungan dari kawasan IKN ini.

"Karena pemindahan IKN akan berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, mengganggu habitat flora dan fauna, merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak Kawasan hutan," urai Johan.

Johan menyebutkan lokasi dipilihnya letak Kawasan IKN yang berada diantara hutan konservasi Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar akan mengancam keberlangsungan ketersediaan sumber air sehingga memperparah krisis sumber air dan yang pasti mengancam Kawasan lindung dan konservasi teluk Balikpapan.

"Kami dari FPKS menegakkan kepada pemerintah bahwa pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan,



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Kami dari FPKS menegaskan kepada pemerintah bahwa pembangunan dan aktivitas yang merusak ekosistem hutan, merusak sumber air dan Kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap UU No. 32/2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup"

merusak sumber air dan Kawasan mangrove merupakan pelanggaran terhadap UU No. 32/2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup", ucap Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini mengungkapkan bahwa Wilayah IKN memiliki Kawasan

hutan seluas 108.364 Ha, dan memiliki sekitar 527 jenis tumbuhan, 180 jenis burung, lebih dari 100 mamalia dan terdapat spesies dengan status konservasi tinggi, dilindungi, endemik dan spesies penting.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Perintah Undang-undang, Legislator PKS Ingatkan IKN Dapat Dihentikan

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, (18/1/2022). Pembahasan RUU IKN ini hanya membutuhkan waktu 43 hari sejak pansus RUU IKN dibentuk pada 7 Desember 2021.

Dari total sembilan Fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menyatakan menolak untuk RUU IKN dibawa pada rapat paripurna untuk disahkan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menegaskan alasan penolakan PKS salah satunya adalah pembangunan IKN berpotensi mengakibatkan alih fungsi lahan hutan secara cepat, yang tentunya akan mengancam kehidupan dan ekosistem di Pulau Kalimantan umumnya dan lokasi IKN khususnya.

Slamet yang merupakan Kepala Poksi IV Fraksi PKS menegaskan pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia/ Kalimantan Area For Lung World.

"Oleh karena itu kita harus

berkomitmen untuk menjaga 45% dari luas Pulau Kalimantan peruntukannya adalah sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan berfungsi lindung," tegas Slamet.

"Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), telah diidentifikasi 3 kawasan High Conservation Value atau kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi di wilayah IKN. Artinya aktivitas di wilayah IKN akan berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem dan satwa pada kawasan," ujar Slamet.

Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang dimaksud antara lain, kawasan lindung berupa Mangrove, Rawa, dan Sempadan Sungai; koridor indikatif satwa liar, serta

terdapat berbagai satwa penting seperti beruang madu, kucing kuwuk, dan macan dahan.

Berangkat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi juga mengingatkan, seharusnya Proyek IKN ini tidak dapat diteruskan.

"Hal tersebut didasarkan pada ketentuan perundangan pasal 17 ayat 2 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu apabila berdasarkan KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka segala usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud tidak diperbolehkan lagi untuk dilanjutkan," pungkasnya.

Menanggapi rencana Pemerintah yang mengembangkan konsep Forest City dalam pengembangan kawasan Ibu Kota Negara, Anggota DPR RI dapil Sukabumi ini menyangsikan pemerintah dapat berkomitmen untuk merealisasikan Forest City, sebab tidak ada definisi maupun prinsip yang jelas dari konsep Forest City.

Selengkapnya kunjungi

fraksi.pks.id



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), telah diidentifikasi 3 kawasan High Conservation Value atau kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi di wilayah IKN. Artinya aktivitas di wilayah IKN akan berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem dan satwa pada kawasan"

Aleg PKS: Pindah Ibu Kota Negara **Tak Lebih Penting** dari Bayar Hutang Pemerintah ke Bulog dan PT. Pupuk Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (23/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengkritisi kebijakan Pemerintah yang hendak pindah ibukota negara, sedangkan persoalan esensial kenegaraan ini masih tidak beres.

Salah satu hal yang mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya, menurut Akmal adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah Undang-undang ibu kota negara disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI ke-13 masa sidang 2021-2022, dan Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

"Pemerintah ini pikir yang besar-besar tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa diantaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke BULOG dan kepada PT Pupuk

Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang. Hutang Bulog kepada Himbara makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya", ketus Akmal.

Politisi PKS ini menjabarkan, Hutang pemerintah kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai 4,5 triliun.

"Hutang ini akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah selama PPKM berlangsung akibat

pandemi," ujar Akmal.

Akmal menambahkan, Sedangkan Untuk pupuk subsidi dari awal tahun kuotanya dikurangi. Bahkan di beberapa daerah, kelangkaan pupuk terjadi sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan. Semua daerah kabupaten kota sentra pertanian pangan pun mengeluarkan persoalan pengurangan dana subsidi pupuk akibat refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).

"Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibukota negara", kritis Akmal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah ini pikir yang besar-besar tapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa diantaranya adalah pemerintah belum mampu bayar hutang ke BULOG dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang. Hutang Bulog kepada Himbara makin menumpuk, sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya"

Bertemu 50 Tokoh di Sepaku, **Aus Hidayat Nur: Otorita IKN Jangan Datang Jadi Otoriter!**

KUTIPAN

Penajam Paser (07/02) --- Bertempat di kediaman Sariman Anggota DPRD Penajam Paser Utara, Aus Hidayat Nur bertemu dengan 50 tokoh masyarakat Sepaku. Terdiri dari tokoh adat, tokoh desa, hingga perwakilan dari kantor Kecamatan Sepaku.

"Saya datang kesini untuk mendengar keluhan masyarakat Sepaku yang daerahnya akan menjadi pusat IKN," buka Aus Hidayat Nur selaku Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur.

"Bahwa IKN sebuah keniscayaan yang akan berlangsung di daerah ini. Tapi kita perlu jaga agar pembangunan yang berlangsung nantinya seimbang antara jiwa dan raganya, atau antara SDM dan infrastrukturnya. PKS dalam hal ini selalu mengawal advokasi kepentingan rakyat di daerah IKN sehingga mendapatkan hak-hak politik, ekonomi, adat, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai undang-undang. Jadi bila kemarin PKS menolak RUU IKN, karena masih banyaknya pasal

yang tidak detail mengatur kepentingan masyarakat di daerah IKN ini," tambah Anggota Komisi II dalam Agenda Kundapil, Sabtu (29/01/2022).

Sibukdin, salah satu tokoh adat yang hadir langsung menyambut.

"Kami ini punya keraguan yang mendalam. Karena sering kali adanya pengakuan pemerintah, bahwa di daerah IKN ini tidak ada masyarakat adat. Jadi kami dianggap bukan manusia?" keluhnya.

Harisah Lurah Sepaku pun menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya sedang euforia antara setuju dan tidak setuju.

"Karena belum adanya kejelasan tanah mereka, bahwa batas hutan produksi dengan

pengelolaan masyarakat itu yang belum jelas," ungkapnya.

Hal tersebut diaminkan oleh Adi Kustaman, Sekcam Sepaku. "Ketika disebutkan bahwa lahan IKN ini seluruhnya tanah konsensi perusahaan, saya sudah langsung laporkan bahwa sesungguhnya ada tanah masyarakat di sana. Tanah yang bersertifikat, ada yang disegel, ada yang fisiknya dikuasai tanpa alasan yang jelas, ada yang masuk perizinan perusahaan sawit, dan ada yang masuk asset pemda," jelasnya.

Selain masalah tanah di areal IKN baru, Adi Kustaman juga menyebutkan masalah aparat desa yang belum masuk dalam pembahasan UU IKN.

"Ternyata nasib perangkat desa, yang nantinya akan menjadi kelurahan ini belum dipikirkan. Kepala Desa yang terpilih di pilkades, masa jabatannya sampai 2028. Sedangkan UU IKN mengatur tahun 2024 semester 1 sudah beralih menjadi kelurahan. Tapi ini belum dipikirkan oleh pemerintah pusat."

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



KH. AUS HIDAYAT NUR
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Bahwa IKN sebuah keniscayaan yang akan berlangsung di daerah ini. Tapi kita perlu jaga agar pembangunan yang berlangsung nantinya seimbang antara jiwa dan raganya, atau antara SDM dan infrastrukturnya. PKS dalam hal ini selalu mengawal advokasi kepentingan rakyat di daerah IKN sehingga mendapatkan hak-hak politik, ekonomi, adat, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai undang-undang. Jadi bila kemarin PKS menolak RUU IKN, karena masih banyaknya pasal yang tidak detail mengatur kepentingan masyarakat di daerah IKN ini"



Pindah IKN Belum Masuk RPJPN, Politisi PKS: Pemerintah **Sradak-Sruduk**

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terlebih dahulu, agar pelaksanaannya cermat, bertahap dan terencana, baik dari segi kelembagaan, tahapan waktu maupun anggaran.

"Sehingga semua kebutuhan pemindahan IKN dapat disiapkan dengan baik dan tidak tambal sulam seperti yang terjadi saat ini," Demikian kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, kepada media, Kamis (03/02).

Mulyanto minta Pemerintah perlu cermat dan seksama melakukan pengkajian serta pembahasan IKN ini dengan semua pemangku kepentingan. Pemerintah jangan jalan sendiri melaksanakan program yang berdimensi jangka panjang ini.

"Semestinya rencana pemindahan IKN ini masuk dahulu dalam RPJPN. Rencana pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu

apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak," ungkapnya.

Pemindahan IKN, imbuhnya, juga mesti dilaksanakan secara cermat, bertahap dan secara berjangka panjang.

"Sekarang ini yang terjadi bersifat sporadis. Jangankan ada dalam RPJPN, konsep IKN masuk dalam RPJMN 2020-2024 saja melalui proses penyesuaian di tengah jalan. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran proyek IKN bersifat parsial," pungkas Mulyanto.

"Jadi tidak heran, kalau muncul usulan aneh Menteri Keuangan Sri Mulyanto di hadapan DPR untuk

menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), anggaran yang didedikasikan untuk penanggulangan Covid-19, bagi pembangunan IKN baru," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, sebagai proyek besar dengan dimensi jangka panjang, harusnya konsep pemindahan IKN masuk dalam RPJPN, sehingga ia menjadi sebuah konsensus nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

"Bukan sekedar kemauan rezim penguasa yang terkesan memaksakan kehendak dan bersifat temporal. Kalau rezim Pemerintahan yang akan datang menolak untuk meneruskan, akan menjadi tidak optimal," terang Mulyanto.

"Kita can punya kerangka kerja TELOS (technical, economic, legal, organizational and scheduling) untuk menilai kelayakan suatu proyek. Apalagi proyek besar seperti pemindahan IKN baru. Tidak bisa sradak-sruduk," tambahnya.

Sekarang ini secara scientific-technologically saja masih banyak perdebatan para ahli. Misalnya aspek resiko bencana geologi di wilayah IKN baru serta langkah-langkah



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pemerintah perlu cermat dan seksama melakukan pengkajian serta pembahasan IKN ini dengan semua pemangku kepentingan. Pemerintah jangan jalan sendiri melaksakan program yang berdimensi jangka panjang ini.

mitigasinya.

"Belum lagi hitung-hitungan biaya pembangunan IKN dengan mempertimbangkan biaya mitigasi resiko tersebut serta aspek ekonominya," kata Mulyanto.

"Pemerintah harus berpikir

ulang dengan tenang dalam merumuskan hal-hal besar yang berdimensi jangka panjang bagi kebaikan bangsa ini," tegas politisi yang akrab dipanggil Pak Mul ini.

Pasca Penetapan UU IKN, Aus Hidayat Nur Bertemu Tokoh Adat di Balikpapan

KUTIPAN

Balikpapan (02/02) -- Bertempat di sebuah rumah makan yang terletak di bilangan Simpang Empat Balikpapan Baru, Aus Hidayat Nur bersama Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji bersilatullah dengan Tokoh Adat Kutai dan Tokoh Bubuhan Banjar.

Pertemuan yang digelar dengan agenda makan malam itu, tampak penuh dengan nuansa kekeluargaan.

"Alhamdulillah, kita bisa bertemu. Dengan pertemuan seperti ini, kita akan dapat saling memahami," sambut Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur tersebut.

Saat memperkenalkan diri, Aus Hidayat Nur menyampaikan bahwa partainya (PKS) saat ini merupakan satu-satunya partai yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah.

"Kakeknya adalah pahlawan nasional, pendiri Al Khairat di Palu," ungkapnya memperkenalkan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri.

"Beliau pernah menjadi Menteri Sosial dan Duta Besar untuk Arab Saudi di era SBY," tambahnya.

Agenda ini sesungguhnya merupakan rangkaian Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil).

Anggota Komisi II DPR RI ini hendak mendengar pandangan para tokoh adat, terutama dalam rangka menyambut pemindahan Ibukota Negara ke wilayah Kalimantan Timur.

"Kita ini punya bangsa dan negara yang kaya dengan adat-budaya. UNESCO saja mengakui, rumah budaya terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi negara ini harus dibangun dengan keragaman

budayanya, dan jangan sampai budaya itu tersingkirkan oleh pembangunan," harap Abdur Rahim, Ketua Lembaga Budaya Adat Kutai.

Sementara itu, Luqman selaku Tokoh Bubuhan Banjar berharap PKS bisa terus melanjutkan perbaikan-perbaikan tata kelola negara.

"Terus perjuangan kebenaran dengan menyebarkan rahmatan lil alamin," ujarnya.

Sebelum pertemuan ditutup, Aus Hidayat Nur memberikan kenang-kenangan berupa rompi yang bertuliskan 'Berhenti Berseteru, Mulailah Bersatu'.

"Kita ingin masyarakat Kaltim fokus mengawal kemaslahatan Kaltim, dan tidak mudah diadu domba hingga saling berseteru," pesannya.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Alhamdulillah, kita bisa bertemu. Dengan pertemuan seperti ini, kita akan dapat saling memahami. Kita ingin masyarakat Kaltim fokus mengawal kemaslahatan Kaltim, dan tidak mudah diadu domba hingga saling berseteru"



5 NEGARA GAGAL PINDAHKAN IBUKOTA

PKS: INDONESIA BERPOTENSI JADI YANG SELANJUTNYA

Aspek-aspek yang menyebabkan pemindahan Ibukota dinilai gagal ialah: minimnya jumlah penduduk/sepi di ibu kota baru, goyahnya kondisi ekonomi negara akibat pemindahan ibu kota, dan lambannya laju ekonomi di ibu kota baru.

Berikut sejumlah negara yang dikategorikan gagal dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara:

Sejak awal PKS menolak pemindahan Ibu Kota Negara Baru. Ada sejumlah faktor yang membuat PKS menolak pemindahan IKN, yakni ngebutnya pengesahan RUU IKN, defisit APBN, serta situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali.





Tol Bawah Air Ibu Kota Baru (IKN), Aleg PKS: **Baru Wacana,** Belum Dianggarkan

KUTIPAN

“Saya kira Pembangunan terowongan bawah air nanti, bisa menjadi kesempatan terbaik untuk menguji teknologi SFT yang merupakan produk anak bangsa. Sehingga diharapkan penyempurnaan-penyempurnaan rancangan dan penggunaan bahan material akan dapat dilakukan secara nyata,” tutup Toriq.

Tasikmalaya (27/01) — Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Pemerintah akan membangun tol bawah air. Rencananya ruas tol ini akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN).

Menanggapi hal tersebut, saat ditanya oleh konstituennya Toriq Hidayat Anggota Komisi V DPR RI menyebutkan bahwa pembangunan Tol bawah air di IKN baru wacana.

“Tahun ini pembangunan proyek utama IKN saja belum akan dimulai, seperti yang

disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian PUPR. Dikarenakan belum ada anggaran. Jadi, saya asumsikan tol bawah air di IKN baru wacana,” ujar Politisi asal PKS ini.

Kemudian Toriq mengatakan bahwa wacana pembangunan jalan raya di bawah air sesungguhnya sudah digaungkan sejak lama. Teknologi terowongan layang bawah air atau yang disebut dengan Submerge Floating Tunnel (SFT) telah diujicobakan di laboratorium BPPT.

“Saat itu Perekayasa bidang transportasi BPPT

menyebut SFT mempunyai kelebihan dan keunggulan. Selain dapat menekan cost yang harus dikeluarkan, rancangan SFT ini sangat ramah lingkungan dan dijamin tidak akan merusak lingkungan bawah air,” tuturnya.

Toriq berharap penerapan teknologi SFT tersebut, jangan hanya di lokasi IKN saja. Karena masih banyak daerah di Indonesia yang dipisahkan oleh perairan. Selain itu, ironinya, SFT yang merupakan inovasi anak bangsa, hingga saat ini belum diaplikasikan di Indonesia.

“Saya kira Pembangunan terowongan bawah air nanti, bisa menjadi kesempatan terbaik untuk menguji teknologi SFT yang merupakan produk anak bangsa. Sehingga diharapkan penyempurnaan-penyempurnaan rancangan dan penggunaan bahan material akan dapat dilakukan secara nyata,” tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Wacana pembangunan jalan raya di bawah air sesungguhnya sudah digaungkan sejak lama. Teknologi terowongan layang bawah air atau yang disebut dengan Submerge Floating Tunnel (SFT) telah diujicobakan di laboratorium BPPT. Saat itu Perekayasa bidang transportasi BPPT menyebut SFT mempunyai kelebihan dan keunggulan. Selain dapat menekan cost yang harus dikeluarkan, rancangan SFT ini sangat ramah lingkungan dan dijamin tidak akan merusak lingkungan bawah air



11 ALASAN PKS MENOLAK UU IKN

- 1 Beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung beberapa permasalahan konstitusionalitas.
- 2 Fraksi PKS memandang bahwa karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat, belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam RUU tersebut
- 3 Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam pemindahan ibukota tersebut harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah dan kesiapan instansi untuk pindah ke Ibukota Baru.
- 4 Fraksi PKS memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan yang penting.
- 5 Perlunya rencana induk yang baik dan transparan, termasuk pendanaannya serta terintegrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU ini.
- 6 Fraksi PKS berpendapat bahwa pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif
- 7 Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan/atau membebani APBN pada kemudian hari.
- 8 Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara.
- 9 Pengadaan tanah untuk IKN yang mengambil tanah hak milik pribadi, tanah adat dan tanah eks kesultanan harus dengan pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10 Kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional harus berada di ibukota negara.
- 11 Fraksi PKS berpendapat bahwa ibukota negara seharusnya menjadi center of gravity yang menjadi area yang paling penting bagi pertahanan dan keamanan negara.



Kritik Rencana Pemindahan Ibukota Negara, HNW: Belum Sepenuhnya Didukung Rakyat dan Tidak Prioritas

KUTIPAN

Jakarta (18/1) - Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan kritik tajam atas rencana pemindahan Ibukota Negara dalam forum Public Expose Fraksi PKS DPR RI, Selasa siang (18/1).

Menurutnya, sikap rakyat Indonesia belum diketahui secara utuh karena tidak ada survei yang pernah dilakukan, baik oleh Pemerintah ataupun lembaga survei, untuk melihat sejauhmana dukungan rakyat terhadap pemindahan IKN.

"Yg layak untuk dicermati, dari sekian banyak isu penting, dan dari sekian banyak lembaga survei yang ada, tetapi sayangnya tidak ada satupun lembaga yang melakukan survei terkait sikap rakyat terhadap RUU IKN/pemindahan Ibukota Negara ini. Mengapa tidak disurvei? Padahal, kalau disurvei, itu akan kemudian menjelaskan sesungguhnya posisi rakyat itu bagaimana", ujar HNW.

Public Expose RUU IKN

HNW meyakini bahwa tidak sedikit rakyat Indonesia yang menolak pemindahan IKN tersebut. Oleh sebab itu, Fraksi PKS tegas menolak pengesahan RUU IKN yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI pagi tadi. Meskipun, pada akhirnya, RUU IKN tetap disahkan menjadi Undang-Undang.

"Fraksi PKS sudah melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, secara konstitusional dan demokratis. Ketika kemudian dilakukan

pengambilan keputusan dengan mekanisme melihat dukungan mayoritas fraksi, didapatkan bahwa fraksi PKS tidak bisa menggagalkan RUU tersebut. Namun, kami tetap istiqomah untuk memperjuangkan sikap yang merupakan aspirasi rakyat. Dan jelas sekali, aspirasi rakyat terkait pemindahan IKN ini banyak yang tidak setuju. Sangat banyak yg mengkritisi", jelas HNW.

HNW pun mengkritik sikap Pemerintah yang justru tidak fokus untuk menjunjung tinggi asas prioritas dalam penyusunan program, dan memilih melakukan pemindahan IKN yang jelas tidak pernah disebut sebagai program di masa kampanye silam.

"Kalau menggunakan asas prioritas, maka jelas sekali prioritas bagi Presiden adalah melaksanakan janji-janji kampanye. Dan tidak ada janji kampanye, baik itu dalam program kampanye maupun debat capres di TV, yang menyebut pemindahan IKN. Justru janji kampanye yg sangat banyak, misalnya terkait tidak impor beras, tidak impor



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"PKS akan kebersamai rakyat untuk memperjuangkan demokrasi yg berkualitas. Oleh sebab itu, bila kemudian ada warga negara yg merasa dirugikan karena secara formil pembahasan UU IKN tidak mengakomodasi suara rakyat, tergesa-gesa, dan sebagainya, maka PKS akan menghormati langkah-langkah tersebut"

beragam komoditi, tidak utang, dan sebagainya, termasuk membuka lapangan kerja, itu tidak telaksana dengan sebaik-baiknya, bahkan beberapa tidak telaksana. Padahal, itu yg

harusnya menjadi prioritas", ungkap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pansus RUU IKN FPKS Tegaskan Skema Pindah Ibu Kota Negara oleh Pemerintah Belum Siap

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam mengatakan bahwa apa yang diajukan Pemerintah atau yang mewakilinya tidak memberikan gambaran meyakinkan bahwa ini layak untuk pindah ibukota.

Dalam Public Expose RUU IKN yang digelar Fraksi PKS DPR RI, Ecky menegaskan ketiga membahas rencananya seperti apa, master plannya seperti apa itu tidak terjawab bahkan terkesan belum siap.

"Yang menarik dan pertama adalah satu 'concern' dari seluruh anggota pansus seluruh Fraksi dan DPD bahwa naskah awal RUU ini berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, bertentangan dengan konstitusi kita. Karena memang sejak awal, RUU ini ingin Pemerintahah ibukota ini otorita," terang Anggota Komisi XI DPR ini.

Public Expose RUU IKN

Bahwa di dalam pasal 18 UUD 1945, lanjut Ecky, itu jelas negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Provinsi dibagi atas beberapa Kabupaten/Kota.

"Jadi tidak mengenal ada otorita. Itu dari awal saja sudah bermasalah. Maka perdebatan seputar otorita ini berhari-hari,

baik sebelum reses hingga setelahnya. Dan semua berkuat pada otorita saja, Pemerintah tetap tidak mau mundur terkait otorita. Padahal itu tidak ada di nomenklatur pasal 18 UUD 1945," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Kedua, lanjut Ecky, terkait dengan pendanaan. Janji bahwa ini tidak akan membebani APBN tidak terbukti. Karena berdasarkan naskah yang ada menggunakan APBN dan sumber lain yang sah serta KPBU. Tapi berapa yang dari APBN tidak disebutkan.

"Ketika APBN saat ini menghadapi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang berbahaya nanti adalah dari sisi peruntukan anggaran, yang semestinya untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dialihkan untuk anggaran pembangunan ibukota," ungkapnya.

Ketiga, imbuh Ecky, terkait dengan barang milik negara di Jakarta yang eks Kementerian itu dibuka pasal lebar-lebar untuk pengalih tangan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Panitia Khusus (Pansus)
RUU Ibu Kota Negara (IKN)

"Kalaupun Barang Milik Negara (BMN) ini tidak akan dipakai karena akan pindah ibukota, maka harus diingat kalau barang milik negara sebagiannya sudah menjadi 'underline' sukur dan masuk ke dalam neraca pemerintah pusat dan nilainya signifikan. Perlu diingat barang milik negara di Jakarta ini nilai valuasinya selalu naik sehingga selalu di revaluasi sehingga menjadi 'underline' aset. PKS sangat tidak setuju barang ini dipindahtanggankan"



Faisal Basri: Pembangunan IKN Bukan Solusi Lazim Ditengah Kondisi Ekonomi Dunia Pasca Covid 19.

KUTIPAN

Faisal menjelaskan, banyak sekali buku ekonomi temanya itu Ekonomi di era pasca covid. Karena membuat cara kita bekerja berbeda, cara berhubungan sosial berbeda, interaksi ekonomi juga berbeda, dan ada disrupsi di global supply change

Jakarta (18/1) - Ekonom senior Faisal Basri memandang bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ditengah situasi dunia yang berubah pasca covid merupakan hal yang tidak lazim.

"Ada masalah besar baru akibat covid 19, mayoritas negara di dunia ini meninjau ulang arah pembangunannya, kemudian paradigma pembangunannya, karena ada realitas baru beriringan dengan climate change, kemajuan teknologi dan sebagainya" Disampaikan oleh Faisal Basri dalam Public Expose RUU IKN yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI pada hari Selasa (18/1) di Jakarta.

Faisal menjelaskan, banyak sekali buku ekonomi

Public Expose RUU IKN

temanya itu Ekonomi di era pasca covid. Karena membuat cara kita bekerja berbeda, cara berhubungan sosial berbeda, interaksi ekonomi juga berbeda, dan ada disrupsi di global supply change. Selain itu ada fenomena de-globalisasi, ketahanan pangan dan sebagainya membawa banyak negara untuk berupaya keras mentransformasikan ekonominya atau transformasi besar (great transformation) untuk menghadapi

tantangan-tantangan baru.

"Khusus Indonesia tantangan yang paling di depan mata adalah middle income trap jadi hampir bisa dipastikan jika business as usual kita tidak akan bisa menjadi negara maju pada 2045" ujar Faisal Basri.

Fenomena middle income Trap menurut Faisal sejatinya pemerintah sadar karena pertumbuhan ekonomi semakin tidak berkualitas dan semakin lambat. Di era Presiden Jokowi saat ini pertumbuhan turun menjadi 5% pada periode pertama dan pada periode kedua kira-kira cuma 3,5 persen atau maksimum 4 persen.

"Semua persoalan ini tidak bisa tok cer obatnya Ibukota baru" tegas faisal.

Faisal menambahkan, jadi dalam waktu tidak terlalu lama tidak sampai 10 tahun, Indonesia pendapatan perkapitanya akan disusul oleh Vietnam, jangankan menyusul Thailand dan Malaysia bahkan akan disusul oleh Vietnam dan lebih cepat lagi disusul oleh Filipina.



FAISAL BASRI
Ekonom

"Ada masalah besar baru akibat covid 19, mayoritas negara di dunia ini meninjau ulang arah pembangunannya, kemudian paradigma pembangunannya, karena ada realitas baru beriringan dengan climate change, kemajuan teknologi dan sebagainya"



Formappi : Sulit Mengharapkan Partisipasi Publik dari Proses RUU IKN, Terancam JR MK

KUTIPAN

Jakarta (18/1) --- Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus melihat pengesahan RUU IKN menjadi gambaran bahwa DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang berdasarkan kepentingan serta minim partisipasi publik

situasi ini memungkinkan adanya Judicial Review seperti UU Cipta Kerja.

"Terlihat hanya terjadi pada RUU tertentu yang menunjukkan kepentingan besar pemerintah, DPR dengan cepat bisa merespon melakukan pembahasan dan menyelesaikannya" disampaikan oleh Lucius Karus dalam acara Public Expose yang diselenggarakan oleh FPKS DPR RI pada hari Selasa (18/1) di Jakarta.

Dalam banyak hal dirinya melihat, proses yang ditunjukkan dalam pembahasan RUU IKN sulit kemudian untuk bisa dikatakan telah memenuhi apa yang oleh Mahkamah Konstitusi

Public Expose RUU IKN

(MK) disebut sesuai dalam aspek formal pembahasan RUU.

Bagaimana kemudian partisipasi publik bisa diharapkan jika DPR hanya menyiapkan slot waktu tidak lebih dari dua minggu proses pembahasan dari 7 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022.

"Waktu yang cukup sempit itu saya kira secara logis sulit untuk kemudian mengharapkan ada partisipasi publik. Jadi

sulit ketika kemudian setelah mereka rapat maraton selama 16 jam langsung kemudian masuk agenda Paripurna." ungkap Lucius

Kapan kemudian publik bisa berkomentar, memberikan saran, dan memberikan kritikan terkait dengan subtransi-subtransi yang dibahas dalam Panja RUU IKN. Jadi dalam ketersediaan waku sulit untuk melihat ada itikad baik dari DPR dan Pemerintah untuk memastikan publik dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan RUU IKN.

Lucius melihat minimal kemudian update terkait isu-isu yang dibahas oleh Pansus RUU IKN itu bisa setiap saat disajikan ke publik. Dirinya melihat di website DPR terkait dengan rekam jejak proses pembahasan RUU yang paling lengkap di sana justru bahan-bahan dari narasumber dari ahli yang memberikan pandangannya pada proses RDPU di awal pembahasan RUU IKN.

Setelah itu kita tidak menemukan lagi data terkait dengan apa isi rapat DPR dalam pansus RUU IKN ini. Jadi



LUCIUS KARUS

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi)

"Saya kira semua itu kemudian membuat kita merasa bahwa keputusan MK yang sudah pernah mengatakan RUU Cipta Kerja yang dihasilkan DPR dan pemerintahan inkontitusional bersyarat itu mungkin terulang kembali Jika ada masyarakat yang mengajukan judicial review terkait RUU IKN ini"

bagaimana mengharapkan partisipasi publik jika informasi dasar soal apa yang dibahas DPR terkait RUU IKN ini tidak sampai

ke publik.
Selengkapnya kunjungi
fraksi.pks.id

Politisi PKS Nilai Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) Tidak Etis dan Serampangan

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) pada rapat paripurna DPR RI yang diselenggarakan, Selasa (18/01), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam acara Public Expose yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI, Mardani mengatakan ada dua alasan utama mengapa PKS menolak RUU IKN ini. Alasan pertama adalah alasan etis dan alasan kedua adalah alasan logis.

"Saya ingin fokus menyampaikan alasan secara etis karena domainnya adalah domain dari pemimpin. Pemimpin itu apa yang diucapkan adalah apa yang dikerjakan. Jangan sebaliknya. Tidak ada di dokumen awal ketika pak Jokowi dilantik, ada penjelasan tentang IKN. Yang jelas ada Lima janji Presiden," pungkasnya.

Mardani menambahkan

Public Expose RUU IKN

jika dana IKN digunakan untuk membangun SDM sesuai dengan janji Presiden, maka dana yang akan digunakan pada proyek IKN ini, kalau dikonversi menjadi universitas sekelas UI, ITB dan Unair, maka bisa terbangun lima kampus yang nantinya bisa menjadi central of excellent.

"Secara etis mestinya ini perkara fundamental, tapi dianggap jadi perkara main-main. Bayangkan kalau kita

pindah ibukota seperti Brazil bisa puluhan tahun. Malaysia yang dekat dengan kita meski jarak pindahannya pendek perlu puluhan tahun. Nah ini lagi-lagi tidak etis," pungkas Anggota Komisi II DPR RI ini.

Terakhir, kata Mardani, sikap Pemerintah ini akan menjadi catatan yang nantinya akan dinilai oleh anak cucu kita. Bagaimana pemindahan ibukota negara dilakukan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, dan cenderung serampangan.

"Partai Keadilan Sejahtera akan terus mengawal, walaupun kita satu-satunya yang menolak kita tidak berkecil hati. Kita akan terus membangun narasi bahwa ini project yang harus kita awasi dan harus kita kawal untuk rakyat," tutup Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

"Saya ingin fokus menyampaikan alasan secara etis karena domainnya adalah domain dari pemimpin. Pemimpin itu apa yang diucapkan adalah apa yang dikerjakan. Jangan sebaliknya. Tidak ada di dokumen awal ketika pak Jokowi dilantik, ada penjelasan tentang IKN. Yang jelas ada Lima janji Presiden"

Tanggapi Tuntutan Federasi Buruh, **Aleg PKS: Semua Jadi Bagian Perjuangan Fraksi PKS**

KUTIPAN

Para Buruh yang menggelar 'Aksi Nasional' ini menuntut penolakan terhadap UU Omnibus Law, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, peningkatan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) 5-7 % dan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta (15/01) — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama gabungan sejumlah Konfederasi Buruh lainnya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (14/01/2022).

Para Buruh yang menggelar 'Aksi Nasional' ini menuntut penolakan terhadap UU Omnibus Law, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, peningkatan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) 5-7 % dan Revisi UU Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi Aksi Nasional para Buruh, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa

Amaliah mengatakan, apa yang dituntut kaum buruh pada dasarnya sesuai dengan apa yang diperjuangkan Fraksi PKS DPR RI.

"Kalau melihat isi tuntutan, seperti halnya Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, sejak awal kami di Fraksi PKS sudah menolak RUU tersebut. Kemudian terkait dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), saat ini kami di Fraksi PKS terus mendorong agar RUU ini segera disahkan," ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I ini menambahkan tuntutan lainnya seperti

peningkatan Upah Minimum Kota/ Kabupaten pun menjadi perhatian terutama di sejumlah daerah.

"Sejauh ini berkaitan dengan upah minimum kota/ kabupaten didorong untuk dibahas di komisi IX," ujarnya.

Fraksi PKS, imbuh Ledia, akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law di DPR RI.

"Bagi Fraksi PKS yang sejak awal menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja perbaikan UU Ciptaker harus memastikan meng-klaster bidang-bidang yang sejenis," tegasnya.

"Fraksi PKS juga berharap ada usulan dari Serikat Pekerja dan masyarakat, jika kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja, harus ada desain peningkatan kesejahteraan pekerja," tutup Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

"Kalau melihat isi tuntutan, seperti halnya Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, sejak awal kami di Fraksi PKS sudah menolak RUU tersebut. Kemudian terkait dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), saat ini kami di Fraksi PKS terus mendorong agar RUU ini segera disahkan,"





PKS **Konsisten** Tolak Segala Bentuk Kekerasan Seksual dan Harus Diatur secara Komprehensif

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan sikap Fraksi PKS yang menolak segala bentuk kejahatan seksual sehingga perlu diberikan pemberatan hukuman.

Kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran.

"Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan pentingnya pengaturan komprehensif tindak pidana kesusilaan untuk melindungi bukan hanya korban kekerasan seksual tapi juga korban-korban kejahatan seksual lainnya akibat seks

bebas dan seks menyimpang.

"Fraksi PKS ingin agar ketiganya diatur dalam UU khusus sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan. Tanpa pengaturan komprehensif dimaksud perlindungan terhadap korban menjadi tidak kuat, tidak utuh, atau parsial," tegas Jazuli.

Faktanya, lanjut Anggota DPR RI Dapil Banten ini, baik kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang semuanya menghasilkan korban dan korbannya adalah anak-anak kita, remaja, perempuan, orang tua dan keluarga Indonesia.

Dan dalam banyak kasus mereka yang terlibat seks bebas dan seks menyimpang kerap mengalami kekerasan

seksual berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan aborsi akibat hubungan di luar nikah, dll sebagaimana data-data pengaduan kekerasan seksual di luar perkawinan (pacaran) yang diterima dan dipaparkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Pusat Advokasi PKS, dan lembaga-lembaga advokasi kekerasan seksual lainnya.

"Yang sangat menyedihkan kasus-kasus seks bebas dan seks menyimpang serta kekerasan seksual akibat perilaku tersebut semakin marak dan meningkat grafiknya dari tahun ke tahun," pungkasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS berpendapat jangan pisahkan tindak pidana kekerasan seksual dengan tindak pidana kesusilaan lainnya (seks bebas dan seks menyimpang) agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran. Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Wakil Ketua FPKS: Keamanan Siber di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

KUTIPAN

Jakarta (22/01) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyoroti banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia dan dialami sejumlah lembaga Pemerintah seperti KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, POLRI dan yang terbaru peretasan yang dialami Bank Indonesia.

Menurut Sukamta, kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

"Ini sudah dalam kategori darurat, perlu penanganan segera dan harus komprehensif. Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula. Jika bicara infrastruktur berarti ini menyangkut regulasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta ketersediaan SDM."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyelaskan lambatnya

respon pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat hingga saat ini banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya.

"Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP, sudah 5 masa sidang RUU ini dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal. Padahal kalau pemerintah punya mau, RUU IKN bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari.

Padahal kalau ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi ini lebih serius dibanding IKN. Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungannya," papar Sukamta.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap meski belum ada UU PDP, pemerintah harus segera benahi infrastruktur keamana sibernya, mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah.

"Di luar soal regulasi, pemerintah bisa segera benahi sistem proteksi, pembaharuan aplikasi, enkripsi data, backup data hingga tata kelola sdm pengelola keamanan siber. Saya yakin BSSN sudah punya catatan apa saja yang harus segera diatasi. Banyak ahli IT dan keamanan siber di Indonesia yang juga bisa diajak berkolaborasi. Semoga kasus kebocoran data BI ini yang terakhir. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa penjelasan dan jaminan keamanan," tutupnya.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP, sudah 5 masa sidang RUU ini dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal. Padahal kalau pemerintah punya mau, RUU IKN bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari.

Usulan Bentuk Pemerintahan IKN Otorita

Bukti Resentralisasi Pusat dan Kemunduran Demokrasi

KUTIPAN

Jakarta (14/01) — Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI Teddy Setiadi mengkritisi bentuk Pemerintahan di Ibukota Negara baru dalam Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) yang kurang mengakomodasi proses-proses demokratis dalam pengelolaan wilayah Ibukota Negara.

Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan wilayah IKN (Ibukota Negara) yang terlalu berpusat di Presiden dan Badan Otorita Ibukota Negara.

“Pengelolaan IKN ini executive-heavy. Peran presiden sangat sentral dalam pengelolaan Badan Otorita IKN lewat adanya wewenang pengangkatan, pemberhentian hingga tata kelola pemerintahan” ujar Teddy Setiadi, Anggota Fraksi PKS DPR RI pada hari Rabu (12/1) di Jakarta.

Teddy juga melihat bahwa wewenang Badan Otorita IKN terlalu besar. Selain berperan dalam proses pemindahan, pembangunan dan persiapan ibukota Negara, Badan Otorita juga mengeluarkan peraturan daerahnya sendiri tanpa Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini dapat berpotensi melanggar konstitusi Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Tanpa adanya lembaga DPRD akan menghasilkan resentralisasi pusat, mereduksi semangat otonomi daerah dan demokrasi yang partisipatif di IKN. Hal ini menurut Teddy bermasalah karena Badan Otorita memiliki wewenang atas sebuah wilayah dan populasi.

“Bagaimana kita bisa menjamin bahwa peraturan

yang dihasilkan bersifat demokratis dan mengakomodir semua pihak? Badan Otorita tidak bisa bikin peraturan sendiri tanpa konsultasi dengan warga setempat yang menjadi penduduk wilayah RUU IKN” ujar Teddy.

Sementara itu, peran DPR dalam RUU IKN relatif lebih sedikit dibandingkan Presiden dan Badan Otorita Ibukota Negara. Menurut Teddy, DPR hanya berperan sebagai tempat konsultasi Presiden terkait pemberhentian, penunjukan dan pengangkatan Kepala Badan Otorita IKN. Dengan kondisi seperti ini, pengawasan terhadap kinerja Badan Otorita Ibukota Negara cenderung minim.

“Belum ada klausul yang jelas dalam RUU ini terkait pengawasan kinerja Badan Otorita IKN. DPR sendiri wewenangnya di bagian ini terbatas” ujar Teddy.

Menurut Teddy, minimnya pengawasan terhadap Badan Otorita IKN dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Badan Otorita IKN bisa bertindak sendiri tanpa ada teguran dari institusi pemerintah lainnya. Hal ini akan berdampak buruk pada pengelolaan



TEDDY SETIADI, S.Sos.
Anggota Komisi II DPR RI

“Bagaimana kita bisa menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan bersifat demokratis dan mengakomodir semua pihak? Badan Otorita tidak bisa bikin peraturan sendiri tanpa konsultasi dengan warga setempat yang menjadi penduduk wilayah RUU IKN”

Ibukota Negara yang diyakini dapat menimbulkan dampak sosial besar ke masyarakat sekitarnya.

Terakhir, Kepala Badan Otorita IKN dapat diangkat 5 tahun sekali sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. RUU ini tidak menyebutkan klausul mengenai batas berapa

kali menjabat.

“Artinya, Kepala Badan Otorita IKN bisa menjabat 10 tahun lebih atau seumur hidup jika selama 5 tahun sekali Presiden memperpanjang masa jabatannya. Ini kurang demokratis karena kurang menjamin adanya pergantian kepemimpinan di suatu wilayah. Padahal ini penting”, tutup Teddy.

Jadwal Pemilu 2024 Ditetapkan, **Aleg PKS: Peraturan Lebih Rinci Diperlukan** agar Kualitas Meningkatkan

KUTIPAN

Hal ini karena Pemilu akan digelar kemungkinan masih dalam suasana Pandemi, dan bangsa Indonesia tentunya akan menyongsong pemimpin baru karena Presiden Joko Widodo sudah memimpin selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan lagi.

Jakarta (25/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menanggapi penetapan jadwal Pemilu serentak tahun 2024 yang dilakukan Komisi II bersama Mendagri, KPU dan Bawaslu.

"Setelah sebelumnya ada perbedaan usulan tanggal antara Pemerintah dan KPU, akhirnya dalam rapat siang kemarin kita sudah sepakat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," tegas Aus Hidayat Nur kepada konstituennya di Kalimantan Timur, selepas Raker Komisi II Senin, (24/01/2022).

Anggota Fraksi PKS ini menyebutkan, bahwa Pemilu 2024 punya rasa yang berbeda dengan Pemilu 2019.

"Ada tiga rasa Pemilu 2024, yaitu Pandemi, Demokrasi dan Sukses," ujarnya.

Hal ini karena Pemilu akan digelar kemungkinan masih dalam suasana Pandemi, dan bangsa Indonesia tentunya akan menyongsong pemimpin baru karena Presiden Joko Widodo sudah memimpin selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan lagi.

"Seluruh penyelenggara kerja perlu lebih cermat. Peraturan yang lebih rinci diperlukan untuk meningkatkan

kualitas Pemilu," pesannya.

Aus Hidayat Nur juga menghimbau agar seluruh pihak dari masyarakat yang berkepentingan perlu diberi ruang untuk berpartisipasi.

"Beri ruang yang cukup kepada semua pihak yang berkepentingan dari masyarakat. Karena kemungkinan masih dalam masa Pandemi, maka tetap perlu aturan protokol untuk menjaga kesehatan. Namun demikian, jangan sampai peraturan-peraturan yang diterapkan menciderai demokrasi itu sendiri," harapnya.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi II DPR RI

"Beri ruang yang cukup kepada semua pihak yang berkepentingan dari masyarakat. Karena kemungkinan masih dalam masa Pandemi, maka tetap perlu aturan protokol untuk menjaga kesehatan. Namun demikian, jangan sampai peraturan-peraturan yang diterapkan menciderai demokrasi itu sendiri



Aleg PKS **Kritisi** Wacana Perubahan Kedua UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

KUTIPAN

Jakarta (15/01) — Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil mengkritisi wacana perubahan kedua terhadap UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

Pendapat Anggota legislatif dari Dapil Aceh tersebut, merupakan tanggapan terhadap pernyataan Ketua DPR-RI Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam pidato tersebut, Ketua DPR RI tersebut menyatakan bahwa UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya perlu diubah kembali sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada pokoknya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).

Nasir Jamil melihat pernyataan pimpinan DPR-RI tersebut menunjukkan bahwa koalisi pemerintah cenderung pada pendekatan teknokratis daripada menjaga konsistensi pada prinsip konstitusionalisme.

“Saya melihat ada kesalahan sudut pandang dalam menafsirkan Putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Padahal yang inkonstitusional menurut MK adalah UU Cipta Kerja, namun yang diubah justru UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.” ujarnya. Legislator PKS dari Dapil

Aceh tersebut melihat pendekatan dan penyikapannya Pimpinan DPR terhadap Putusan MK tersebut kurang tepat.

Pendekatan teknokratis dengan mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya terkesan lebih pragmatis karena orientasi dikhawatirkan hanya sebagai justifikasi untuk mempertahankan Omnibus Law(UU Cipta Kerja).

Permasalahannya keberadaan masyarakat selama ini terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya pada aspek formal tapi juga substansi undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan kepentingan nasional pada umumnya.

“Sejak pembahasan dan pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja, Fraksi PKS sudah mengingatkan bahwa RUU ini bermasalah baik secara formal maupun substansinya. Oleh sebab itu saya sangat setuju dengan salah satu pertimbangan putusan MK tersebut bahwa tujuan sesekali tidak boleh menhalaikan segala cara. Dalam

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

Pendekatan teknokratis dengan mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya terkesan lebih pragmatis karena orientasi dikhawatirkan hanya sebagai justifikasi untuk mempertahankan Omnibus Law(UU Cipta Kerja).

semangat konstitusionalisme, DPR seharusnya berorientasi pada penegakan dan penghormatan tertib hukum bukan kepentingan transaksional, sehingga yang seharusnya diubah dan

disesuaikan adalah UU Cipta Kerja itu sendiri. Fraksi PKS terbuka untuk membahas Kembali UU Cipta Kerja” tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Harga Pangan Terus Naik Aleg PKS : Akibat Pemerintah Terlalu Banyak Gimmick dan Tidak Serius

KUTIPAN

Jakarta (14/1) Johan Rosihan, Anggota DPR Komisi IV menilai kenaikan pangan yang terjadi di awal tahun merupakan sesuatu yang luar biasa aneh ditengah potensi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa.

Dirinya melihat situasi ini terjadi karena dalam pengelolaan pangan di Indonesia Pemerintah terlalu banyak 'gimmick' dan tidak serius.

"Sebagai sebuah negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa kenaikan pangan ini bukan sesuatu yang lumrah, tapi sesuatu yang diluar akal sehat. Kalau kita bicara soal kenaikan harga bahan pangan pokok sebenarnya bukan hanya terjadi pada setiap pergantian awal tahun, namun sepanjang tahun" disampaikan oleh Johan Rosihan di PKS Legislative Corner pada hari Jumat (14/1).

Johan menambahkan kenaikan harga pangan tentu

akan menyebabkan ketidakpastian konsumsi pangan masyarakat dan akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia yang menjadi visi dari pemerintah. Ironisnya selama ini Pemerintah seperti enggan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Aleg asal NTB ini berharap pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga yang merupakan siklus berulang setiap pergantian tahun dengan cara melakukan perbaikan produksi, peralatan teknologi tepat guna dan negara memberikan subsidi pada daerah-daerah yang telah mencapai produktivitas pangan. Selengkapnya di fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

“Kenaikan harga pangan tentu akan menyebabkan ketidakpastian konsumsi pangan masyarakat dan akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia yang menjadi visi dari pemerintah. Ironisnya selama ini Pemerintah seperti enggan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya”

Walkout Akibat KLHK
Ingkar Janji

Fraksi PKS Jaga Marwah Lembaga DPR



“Aksi walkout fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menjaga marwah lembaga DPR RI dengan memberikan sikap yang tegas

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Dalam RDP sebelumnya komisi IV meminta nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selambat-lambatnya 1 minggu setelah RDP.

Namun data yang diberikan hanya menyangkut 713.000 hektar, padahal dalam rapat sebelumnya luas lahan yang terdampak 3,2 juta hektar, dan beberapa perusahaan yang pernah disurvei langsung saat Kunspek ketua dan anggota komisi IV DPR RI di Kalimantan Timur bersama Dirjen Gakkum KLHK dan Gubernur Kalimantan Timur mengenai beberapa perusahaan besar yang masih ilegal, tidak terdapat di dalam daftar yang diberikan.



Fraksi PKS Walkout, Kecewa KLHK Dinilai Tidak Tepati Janji

KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menyatakan aksi walkout Fraksi PKS dalam rapat kerja komisi IV dengan Kementerian KLHK dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif DPR,

dengan menunjukkan sikap yang tegas terkait kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh mitra kerjanya.

"Aksi walkout fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menjaga marwah lembaga DPR RI dengan memberikan sikap yang tegas," ujarnya kepada media di Senayan, Jakarta, Selasa, (25/1/2022).

Dalam RDP sebelumnya komisi IV meminta nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selambat-lambatnya 1 minggu setelah RDP.

Namun data yang

diberikan hanya menyangkut 713.000 hektar, padahal dalam rapat sebelumnya luas lahan yang terdampak 3,2 juta hektar, dan beberapa perusahaan yang pernah disurvei langsung saat Kunspek ketua dan anggota komisi IV DPR RI di Kalimantan Timur bersama Dirjen Gakkum KLHK dan Gubernur Kalimantan Timur mengenai beberapa perusahaan besar yang masih ilegal, tidak terdapat di dalam daftar yang diberikan.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan

Tahun 2022 diwarnai aksi walkout oleh Fraksi PKS.

Slamet yang juga menjelaskan pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat karena KLHK sebagai mitra kerja dinilai tidak bisa memenuhi komitmen yang sudah disepakati. Sebelumnya KLHK berjanji akan menyerahkan data nama-nama perusahaan pemegang HPH bermasalah.

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

“Aksi walkout fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menjaga marwah lembaga DPR RI dengan memberikan sikap yang tegas”

Aleg PKS Minta Pemerintah Segera Bayar Hutang ke Bulog agar Optimal Selesaikan Masalah Pangan

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Hutang Pemerintah kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai 4,5 triliun mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin.

Hutang yang kian waktu kian menumpuk ini, kata Andi Akmal akibat penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.

Padahal menurut pria yang akrab disapa Akmal, sebelum terjadi pandemi pun, pemerintah sudah berhutang ke Bulog pada kebijakan raskin.

"Kami di Komisi IV sepakat, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, agar segera menunaikan hutangnya kepada BULOG. Lembaga ini sangat goyang dan tidak sehat dalam menjalankan perannya dimana seharusnya ada triliunan rupiah sebagai cash flow mereka, akan tetapi kosong akibat adanya hutang

pemerintah ini. Padahal, peran BULOG ini sangat penting dan signifikan di masyarakat sebagai lembaga pengendali ketersediaan pangan", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, seharusnya kalau pemerintah tidak mampu bayar, Jangan memberi tugas kepada BULOG untuk menjalankan fungsi penyaluran Bansos. Jangka waktu berlarut-larut ini menurut Akmal, sama saja mematkan lembaga ini secara pelan-pelan.

"Semua fungsi kelembagaan nya sangat terganggu mulai dari hak SDM nya, hingga pencapaian target-target untuk mewujudkan kedaulatan pangan," pungkasnya.

Anggota DPR RI Komisi IV ini menjelaskan, bahwa ada

efek domino yang membelit BULOG akibat persoalan hutang pemerintah kepada lembaga ini. Pemerintah hutang ke Bulog 4,5 triliun, dan untuk menjaga stabilitas kerja BULOG, lembaga ini hutang kepada bank negara. Hutang Bulog kepada Bank-bank negara bisa mencapai 13 triliun rupiah.

"Saling Hutang Pemerintah, BULOG dan Bank negara ini ibara lingkaran setan yang sulit terurai. Ini dampak jangka panjangnya, masyarakat yang dirugikan. Negara kita ini tidak maju-maju dalam penyelesaian persoalan pangan salah satunya adanya persoalan hutang pemerintah kepada BULOG. Mesti ada solusi yang progresif mulai dari hulu hingga hilir, dan bila ini tidak segera diselesaikan, akan menjadikan hutang BULOG kepada bank akan semakin besar akibat bunga", ketus Akmal.

Menanggapi pernyataan Dirut BULOG yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan sudah siap membayar hanya saja ada persoalan persyaratan belum tercurupi karena ada peraturan menteri yang



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah ini mau bayar cepat apa tidak. Jangan dikatakan sudah siap bayar tapi terpencet aturan. Aturan ini kan bisa 1 hingga 3 bulan selesai diubah. Sedangkan persoalan hutang pemerintah kepada BULOG selalu ada pembahasan di setiap persidangan sepanjang tahun. Ini terlihat bahwa bayar hutang ke BULOG, tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah"

harusnya diubah, Akmal mengatakan ini persoalan kemauan.

"Pemerintah ini mau bayar cepat apa tidak. Jangan dikatakan sudah siap bayar tapi terpencet aturan. Aturan ini kan bisa 1 hingga 3 bulan selesai diubah. Sedangkan persoalan

hutang pemerintah kepada BULOG selalu ada pembahasan di setiap persidangan sepanjang tahun. Ini terlihat bahwa bayar hutang ke BULOG, tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Anggota FPKS Desak Pemerintah Bantu Petani Hasilkan Pangan Berkualitas Industri

KUTIPAN

Jakarta (25/01) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Hermanto mengaku resah melihat data peningkatan komoditas pangan impor khususnya beras untuk kebutuhan industri.

Hermanto mendesak Pemerintah untuk membuat strategi pembenahan kualitas produk pangan petani agar dapat diserap oleh pelaku industri.

"Pelaku industri olahan pangan dalam negeri memiliki dan menetapkan kriteria khusus untuk komoditas pangan guna memenuhi standar proses dan kualitas produk turunan. Sementara itu petani sulit untuk memenuhi kriteria khusus produk pangan tersebut karena minimnya sentuhan teknologi modern," papar Hermanto dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Senin (24/01/2022)

Hermanto meminta Pemerintah agar menyediakan

strategi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk pangan petani hingga kualitasnya setara dengan kriteria yang dapat diterima oleh dunia industri.

"Pemerintah perlu serius menangani hal tersebut guna meraih peluang benefit untuk kesejahteraan petani dalam negeri," ujar legislator dari FPKS DPR ini.

Pemerintah memberi izin impor beras untuk keperluan lain. Misalnya impor untuk kebutuhan industri untuk beras pecah 100 persen dan beras ketan pecah 100 persen dengan kode HS 10064090 serta tepung beras berkode HS 11029010. Impor ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan angka pengenalan

importir produsen (API-P).

Berdasarkan data BPS, impor beras pecah sampai September 2021 mencapai 252.376 ton dengan nilai US\$107,61 juta. Volume impor ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang berjumlah 214.380 ton dengan nilai US\$120,56 juta.

"Data tersebut menunjukan impor beras cenderung meningkat. Pemerintah mestinya menangkap peluang ini agar keuntungannya beralih ke petani dalam negeri," tutur Hermanto.

"Pemerintah agar memberikan porsi yang lebih luas dalam menggarap sektor pertanian berbasis teknologi modern untuk menghadapi peluang pasar guna memenuhi kebutuhan industri dan semakin menyempitnya lahan pertanian serta perubahan iklim," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

“Pelaku industri olahan pangan dalam negeri memiliki dan menetapkan kriteria khusus untuk komoditas pangan guna memenuhi standar proses dan kualitas produk turunan. Sementara itu petani sulit untuk memenuhi kriteria khusus produk pangan tersebut karena minimnya sentuhan teknologi modern”

Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural

FPKS MINTA PEMERINTAH TINDAK TEGAS PERUSAHAAN HUTAN PENGEMPLANG PAJAK DAN MERUGIKAN NEGARA

Rekap penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di 8 provinsi

Kebun : 282 unit (3,9 Juta Ha)
Tambang : 629 unit (3,6 Juta Ha)
Kerugian : 158,5 Triliun
Kalimantan Tengah

Kebun : 86 unit (720 Ribu Ha)
Tambang : 223 unit (774 Ribu Ha)
Kerugian : 31,5 Triliun
Kalimantan Timur

Kebun : 169 unit (2,1 Juta Ha)
Tambang : 384 unit (3,6 Juta Ha)
Kerugian : 121,4 Triliun
Kalimantan Barat

Kebun : 32 unit (370 Ribu Ha)
Tambang : 169 unit (84 Ribu Ha)
Kerugian : 9,6 Triliun
Kalimantan Selatan

Kebun : 9 unit (20 Ribu Ha)
Tambang : 251 unit (617 Ribu Ha)
Kerugian : 13,5 Triliun
Sulawesi Tenggara

Kebun : 215 unit (333 Ribu Ha)
Tambang : -
Kerugian : 7,1 Triliun
Riau

Kebun : 52 unit (298 Ribu Ha)
Tambang : 31 unit (62 Ribu Ha)
Kerugian : 7,6 Triliun
Jambi

Kebun : 33 unit (623 Ribu Ha)
Tambang : 20 unit (328 Ribu Ha)
Kerugian : 13,4 Triliun
Jawa Barat

Potensi Kerugian Negara
Kebun : 878 unit (8,45 Juta Ha)
Tambang : 1707 unit (8,7 Juta Ha)
Kerugian : 362 Triliun



Aleg PKS: **Tunda** Usulan Kenaikan Tarif KRL Commuter Line di Masa Pandemi

KUTIPAN

Tasikmalaya (13/01) — Anggota Fraksi PKS DPR RI Toriq Hidayat menyebutkan saat ini bukanlah saat yang tepat bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line.

Pasalnya, menurut Toriq, banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Harga kebutuhan pokok naik, minyak misalnya. Daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

"Pandemi belumlah usai, bahkan ada potensi varian baru Covid-19, yang hadirkan ancaman gelombang ketiga. Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikkan tarif," kata Toriq.

Anggota Komisi V ini

meyebutkan sepanjang tahun 2021 terjadi penurunan pengguna KAI Commuter line. Untuk wilayah operasi Jabodetabek turun sebanyak 19,6% dibanding jumlah pengguna KRL Jabodetabek sepanjang tahun 2020. Akibat kebijakan PPKM dan melemahnya daya beli masyarakat.

"Akibat pandemi, hampir 20 % jumlah pengguna KAI Commuter line Jabodetabek turun pada tahun 2021. Namun potensi kenaikan ke depan cukup besar, mengingat sebagian masyarakat mengaku tidak punya pilihan lain sebagai

transportasi dengan akses cepat dan lebih nyaman," sebut Toriq.

Selain itu, pungkasnya lagi, usulan kenaikan Tarif ini bertolak belakang dengan semangat Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum massal perkotaan. Mengurangi emisi gas, sehingga lingkungan menjadi lebih sehat.

"Kenaikan tarif berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal. Ini tidak sesuai dengan kampanye Pemerintah terkait peningkatan kesadaran penggunaan angkutan umum massal perkotaan dan non motorized transportation (NMT) pada hari kesehatan Internasional yang diperingati setiap 7 April," tutur Toriq.

Ia menambahkan, masyarakat sangat mengapresiasi KAI dengan berbagai pencapaian kinerja dan upaya inovasi serta modernisasi layanan KRL Commuter Line di masa pandemi.

"Jadi, Jangan sampai gegara usulan kenaikan tarif, kemudian merubah cara pandang masyarakat," tutur Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Kenaikan tarif berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal. Ini tidak sesuai dengan kampanye Pemerintah terkait peningkatan kesadaran penggunaan angkutan umum massal perkotaan dan non motorized transportation (NMT) pada hari kesehatan Internasional yang diperingati setiap 7 April,"

Aleg PKS: Kereta Api Kalimantan Mangkrak, IKN Pun Berpotensi Sama

KUTIPAN

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana pembangunan moda transportasi kereta api trans Kalimantan yang terpaksa harus tertunda.

Hal ini, kata Suryadi, karena Pemerintah Rusia telah memutuskan untuk mundur dari rencana pembangunan rel kereta api trans-Kalimantan. Padahal dana yang telah dikeluarkan tidaklah sedikit.

"Russian Railways telah menginvestasikan 18 juta rubel atau Rp 3,3 miliar untuk pengembangan awal proyek ini dan Pemprov Kalimantan Timur telah mengalokasikan APBD untuk cost of living dan biaya tempat tinggal 150 mahasiswa Kalimantan Timur untuk studi teknik perkeretaapian di Rusia agar setelah lulus memegang operasional kereta api trans Kalimantan ini," papar pria yang akrab disapa SJP ini.

Proyek ini pun, lanjut SJP, oleh Pemerintah telah

dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun 2018 dengan alasan PT. Kereta Api Borneo (KAB) sebagai pemrakarsa tidak mampu menunjukkan rencana aksi dan upaya tindak lanjut kemajuan proyek yang jelas. PT. KAB sendiri merupakan anak perusahaan perusahaan kereta api Rusia, Russian Railways (RZD).

"Proyek dengan nilai investasi Rp 53,3 triliun itu merupakan proyek kereta api batu bara single track sepanjang 203 kilometer mulai dari Kubar, Paser, PPU hingga Balikpapan," jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Beberapa infrastruktur penunjang, kata SJP, yang merupakan satu kesatuan dengan proyek kereta api ini

diantaranya adalah stasiun, jetty batu bara, pelabuhan, dan PLTU dengan kapasitas 15 mega watt (MW).

"Dengan adanya moda transportasi kereta api dapat mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan," tandasnya.

Namun demikian, imbuh SJP, proyek ini kemudian mandek karena karena belum disepakatinya perubahan status yang akan memungkinkan PT KAB mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu.

"Hal ini dibutuhkan agar proyek menjadi lebih layak secara investasi. Sedangkan jika diubah statusnya untuk angkutan penumpang, maka Pemerintah menawarkan untuk bekerjasama dengan PT. KAI, karena perusahaan asing tidak boleh memiliki 100 persen kepemilikan kereta Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva juga mengatakan pada kesempatan yang berbeda bahwa Pemerintah Rusia memutuskan untuk mundur dari rencana proyek ini karena bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Memperhatikan kondisi tersebut, FPKS memandang Pemerintah perlu lebih cermat dalam merencanakan sebuah proyek agar tidak menjadi mangkrak, sebab bisa jadi ada



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Pemerintah perlu lebih cermat dalam merencanakan sebuah proyek agar tidak menjadi mangkrak, sebab bisa jadi ada pihak-pihak yang sudah mengeluarkan biaya. Sehingga perencanaan yang matang diperlukan agar jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan"

pihak-pihak yang sudah mengeluarkan biaya. Sehingga perencanaan yang matang diperlukan agar jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, proyek kereta api Kalimantan merupakan contoh

proyek yang mangkrak akibat kurang matangnya perencanaan," cetus Anggota DPR RI dari Dapil NTB ini. penunjang," ujar SJP. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

IKN Pindah Semester Awal 2024, Anggota FPKS: Terburu-buru dan Gegabah

KUTIPAN

Jakarta (12/1) --- Anggota Pansus Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin memandang bahwa Pemindehan status Ibu Kota Negara yang ditargetkan akan dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 sangat terburu-buru.

Terkait waktu pemindehan IKN ke Penajam Paser Utara (PPU) dalam Draft UU IKN berdasarkan Surpres tanggal 29 September 2021 disebutkan pada Pasal 3 ayat 2 RUU IKN, bahwa "Pemindehan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden".

Hamid menyampaikan dalam Raker Komisi V dengan Kementerian PUPR pada bulan November 2019 disebutkan bahwa dibutuhkan waktu setidaknya 4 tahun sejak tahun 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN seperti sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman yang layak. Sedangkan saat ini di tahun 2022 Pemerintah

masih belum memiliki legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

"Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Dimana akan dibutuhkan setidaknya sekitar Rp 90T yang akan dikucurkan dari APBN untuk kebutuhan pembangunan IKN ini." Ujar Hamid.

Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni. Dimana secara umum terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni, diantaranya tersedianya

kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya. Kemudian tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya.

"Belum lagi aspek keamanan dan keselamatan serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Poin terakhir ini juga menjadi salah satu sorotan FPKS dalam draft RUU IKN yang diajukan Pemerintah, terdapat konsep yang berpotensi mengabaikan hak demokrasi masyarakat yang tinggal di IKN. Dimana nantinya tidak ada lembaga DPRD di IKN yang berfungsi sebagai wakil masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kotanya" ujar Anggota Komisi V ini.

Melihat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa 2 tahun dan melihat kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk mengejar jadwal pemindehan awal tahun 2024, serta dengan mempertimbangkan kriteria kota layak huni yang disebutkan diatas maka Fraksi PKS meragukan bahwa calon



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN)

"Melihat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa 2 tahun dan melihat kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk mengejar jadwal pemindehan awal tahun 2024, serta dengan mempertimbangkan kriteria kota layak huni yang disebutkan diatas maka Fraksi PKS meragukan bahwa calon IKN yang baru di PPU dapat memenuhi kriteria kota layak huni.

IKN yang baru di PPU dapat memenuhi kriteria kota layak huni.

"Belum lagi kondisi di lapangan saat ini masih sering terjadi bencana banjir belum juga dapat diatasi oleh Pemerintah. Maka FPKS mempertanyakan

keputusan Pemerintah yang ingin memindahkan IKN dari Kota Jakarta yang masih layak huni ke PPU yang belum tentu bisa memenuhi kriteria kota layak huni," tutup Hamid dengan tegas.

Anggota Fraksi PKS Soroti Perpres 104/2021 Terkait Alokasi 40% Dana Desa untuk BLT

KUTIPAN

"Tolong perhatikan juga untuk anggaran menyambut tamu, sebab di pemerintahan daerah itu sudah di anggarkan, tetapi kenapa di desa tidak ada anggaran untuk penyambutan tamu," terang Syahrul Aidi.

Jakarta (19/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan alokasi dana desa yang di Indonesia, pada Selasa (18/01/2022) dalam sidang paripurna DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di ruangan sidang DPR RI.

Dalam penyampaian aspirasinya, Syahrul Aidi meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan kembali Perpres no 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa, dimana dalam Perpres ini penggunaan anggaran 40 persen digunakan untuk BLT.

"Di kalangan kepala desa, Perpres ini sudah menuai

polemik, jumlah penduduk di setiap desa itu tidak sama. Ada yang jumlah penduduk tinggi dan ada juga jumlah penduduk sedikit, jadi untuk pemerintah pusat tolong perhatikan kembali Perpres ini " Kata Syahrul Aidi yang juga anggota Fraksi PKS.

Sementara itu, ketika kepala desa tidak menganggarkan 40 persen dari Dana Desa yang digunakan untuk BLT, maka akan dipotong 25 persen. Bagaimana jika desa tersebut sudah mendapatkan sumber dana dari yang lain, tolong perhatikan itu juga.

Selain itu, Syahrul Aidi juga meminta kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi terkait anggaran desa yang digunakan untuk

menyambut tamu.

"Tolong perhatikan juga untuk anggaran menyambut tamu, sebab di pemerintahan daerah itu sudah di anggarkan, tetapi kenapa di desa tidak ada anggaran untuk penyambutan tamu," terang Syahrul Aidi.

Sebab, kata Syahrul, yang menjadi incaran pertama masyarakat ketika dihadapi permasalahan yang dicari adalah pemerintah desa, bukan pemerintah pusat, tegasnya.



**Dr. H. SYAHRUL
AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**
Anggota Komisi V DPR RI

"Di kalangan kepala desa, Perpres ini sudah menuai polemik, jumlah penduduk di setiap desa itu tidak sama. Ada yang jumlah penduduk tinggi dan ada juga jumlah penduduk sedikit, jadi untuk pemerintah pusat tolong perhatikan kembali Perpres ini "



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Aleg PKS Minta Harga Minyak Goreng Rp.14 Ribu Segera Diperluas ke Pasar Tradisional

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Kementerian Perdagangan diminta segera memperluas kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu ke pasar-pasar tradisional untuk menjangkau masyarakat kelas bawah.

"Distribusi minyak goreng Rp14 ribu per liter harus menjangkau pasar-pasar tradisional sebagai bentuk penerapan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat," kata Anggota Komisi VI DPR Amin Ak, Rabu (19/01/2022).

Menurutnya, konsumen pa-sar tradisional dan UMKM merupakan kelompok paling terdampak akibat melambungnya harga minyak goreng yang saat ini dikisaran Rp 20 ribu per liter.

Apalagi, kata Amin, berdasarkan studi Institute for Development on Economics and Finance (Indef), belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan

miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Amin menyebut, kebijakan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter sebenarnya juga masih lebih tinggi dari acuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp11 ribu per liter berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020.

"Sehingga harga yang berlaku saat ini masih memberatkan bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah serta rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin," tutur politikus PKS itu.

Oleh sebab itu, Amin menilai kebijakan harga minyak goreng di level Rp14 ribu per

liter pada dasarnya hanya jalan pintas, karena ketidakberdayaan pemerintah dalam mengendalikan pasokan dan harga CPO untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk memenuhi minyak goreng dalam negeri.

"Padahal sudah ada kesepakatan pemerintah dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tentang kewajiban domestic market obligation sebesar 20 persen yang sudah berjalan sejak tahun 2018," paparnya.

Dengan produksi CPO sebesar 47,5 juta ton pada 2021, Amin menyebut maka besaran DMO mencapai 9,6 juta ton masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 8 juta ton dan harga sesuai HET Rp11.000 per liter.

"Jika dikaitkan dengan kewajiban DMO sebesar 20 persen, maka kebijakan harga Rp14 ribu pada hakekatnya Pemerintah mensubsidi pengusaha," tutur Amin.



AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

"kebijakan harga minyak goreng Rp14 ribu per liter sebenarnya juga masih lebih tinggi dari acuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp11 ribu per liter berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020. Sehingga harga yang berlaku saat ini masih memberatkan bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah serta rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin"

Aleg PKS Sepakat Ekspor bahan Tambang **Jika** Kebutuhan Dalam Negeri Terpenuhi

KUTIPAN

Jakarta (23/01) — Kelangkaan pasokan batubara, dimana PLN membutuhkan komoditas ini sebanyak 20 juta ton untuk mengamankan 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya, mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina.

“Sebagai langkah menghindari pemadaman 10 juta pelanggan listrik PLN, memang kelangkaan batubara ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak mulai dari pemerintah, DPR dan seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah mesti menyiapkan solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN ini. Karena semua ini akan menyangkut pada ketahanan energi nasional”, tutur Nevi.

Nevi menerangkan, bahwa Sejak 4 Agustus 2021, pengaturan kewajiban pasokan batubara

terkait kebutuhan dalam negeri diatur dengan Domestic Market Obligation (DMO) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 139.K/HK.02/MEM.B/2021. Pelaku usaha Wajib memasok 25% dari total produksi batu baranya untuk kebutuhan dalam negeri.

“Saya setuju adanya pelarangan ekspor batubara selama Bulan Januari 2022 sesuai dengan peraturan presiden hingga pemenuhan kebutuhan dalam negeri tercapai. Karena keputusan menteri ESDM no

139.K/HK.02/MEM.B/2021 ditetapkan harga jual batu bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB), lebih tinggi dari harga pasar dunia. Bila tidak ada pelarangan, para produsen akan memilih ekspor untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan dalam negeri semakin kekurangan pasokan”, urai Nevi.

Politisi PKS ini mengusulkan sesuai arahan fraksinya, bahwa Pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan neraca batubara yang lebih komprehensif baik di sisi permintaan maupun di sisi pasokan, sehingga lebih optimal.

Nevi juga mengusulkan kepada PLN agar mencari solusi bagaimana caranya agar bisa membeli dengan cara kontrak jangka panjang secara langsung kepada produsen batu bara dan tidak lagi melalui trader.

“Perlu adanya pengaturan manajemen teknis distribusi-logistik yang ditata sedemikian rupa, sehingga apabila terjadi perubahan cuaca tidak mengganggu persediaan kebutuhan batubara bagi PLN”, katanya.

Pada kesempatan RDPU itu, Nevi meminta kepada asosiasi untuk membuka data perusahaan batu bara mana saja yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. Karena menurutnya, ini dapat menunjukkan adanya



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

“Asosiasi perlu membuka terus komunikasi dengan PLN khususnya PLN Batubara. Komunikasi Ini penting dapat dilakukan agar terjadi harmonisasi secara terus menerus sehingga kontrak-kontrak yang tidak sesuai dapat dihindari di masa yang akan datang”

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

“Asosiasi perlu membuka terus komunikasi dengan PLN khususnya PLN Batubara. Komunikasi Ini penting dapat

dilakukan agar terjadi harmonisasi secara terus menerus sehingga kontrak-kontrak yang tidak sesuai dapat dihindari di masa yang akan datang”, tutup Nevi Zuairina.

Politisi PKS Tolak Usulan LBP untuk Cabut DMO dan PLN Beli Batu Bara dengan Harga Pasar

KUTIPAN

Jakarta (15/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan PKS menolak rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Mavees) Luhut Binsar Panjaitan,

Mencabut kebijakan Domestic Marketing Obligation (DMO) untuk komoditas batu bara

Mulyanto berpendapat kebijakan itu masih diperlukan untuk mengamankan pasokan dan harga batu bara bagi PLN. Jika kebijakan tersebut dicabut Mulyanto khawatir Indonesia akan mengalami krisis energi listrik seperti yang pernah terjadi di beberapa negara.

"Ide Pak Luhut ini berbahaya. Kalau benar dilaksanakan PLN bisa bangkrut dan Indonesia mengalami krisis listrik.

Sebab tanpa DMO dan hanya melalui kontrak, tidak ada jaminan PLN akan mendapatkan batu bara dari pengusaha," tegas Mulyanto.

Mulyanto menegaskan DMO atau kebijakan mendahulu-

lukan menjual komoditas strategis untuk keperluan pasar dalam negeri jangan dihapus. Bila perlu angkanya diperbesar dari 25 persen jadi 30 persen.

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM disepakati bahwa DMO ditingkatkan dari 25 persen menjadi 30 persen. Rapat juga menolak ide Menko Marves membentuk Badan Layanan Umum untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi PLN

"Prinsip DMO yang diturunkan dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah memberikan jaminan baik berupa barang ataupun harga sumber energi untuk penunjang pembagian. Jadi bukan sekedar harga tetapi juga alokasi volume batu baranya. Jadi DMO bukan sekedar

jaminan harga tetapi juga alokasi volume batu baranya," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini juga menolak Pemerintah membentuk BLU. Menurutinya kehadiran BLU batu bara akan menambah ruwet dan masalah baru.

"Tugas BLU menarik iuran ekspor kepada pengusaha untuk menutupi selisih antara harga pasar dan harga DMO agar PLN tidak menaikkan biaya pokok pembangkitan listrik. Itu kalau lancar, kalau tersendat PLN akan runyam," imbuh Mulyanto.

Menindaklanjuti keputusan tersebut Mulyanto minta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk lebih tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan DMO ini. Bila perlu dicabut izin usahanya agar jadi pelajaran bagi perusahaan lain yang membandel.

"Kalau tidak tegas Pemerintah akan disepelekan para pengusaha. Apapun kebijakannya akan dipermainkan. Ujung-ujungnya masyarakat yang rugi," tandas Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Ide Pak Luhut ini berbahaya. Kalau benar dilaksanakan PLN bisa bangkrut dan Indonesia mengalami krisis listrik. Sebab tanpa DMO dan hanya melalui kontrak, tidak ada jaminan PLN akan mendapatkan batu bara dari pengusaha"



Mulyanto PKS:

Ide Pak Luhut Bisa Bikin Indonesia Krisis Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan PKS menolak rencana Menko Maeves Luhut Binsar Panjaitan mencabut kebijakan Domestic Marketing Obligation (DMO) untuk komoditas batu bara. Menurutnya kebijakan itu masih diperlukan untuk mengamankan pasokan dan harga batu bara bagi PLN. Jika kebijakan tersebut dicabut dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis energi listrik seperti yang pernah terjadi di beberapa negara.



Ide Pak Luhut ini berbahaya. Kalau benar dilaksanakan PLN bisa bangkrut dan Indonesia mengalami krisis listrik. Sebab tanpa DMO dan hanya melalui kontrak, tidak ada jaminan PLN akan mendapatkan batu bara dari pengusaha,

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI





Diah Nurwita Sari Pertanyakan Alasan Pemerintah Hapus Premium untuk Rakyat Kecil

KUTIPAN

Jakarta (22/01) --- Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwita Sari mempertanyakan alasan pemerintah yang hapus premium untuk kebutuhan rakyat kecil.

Menurut Diah, berdasarkan data dari pemerintah, realisasi konsumsi premium sepanjang 2016-2021 sangat fluktuatif.

Bahkan, menurut Diah, pemerintah klaim realisasi premium pada 2021 berada pada titik terendah, yaitu 34 persen.

"Data ini menggelitik, karena ada satu kekhawatiran data realisasi ini kemudian dijadikan alasan untuk menghilangkan premium. Dianggap bahwa masyarakat seolah-olah tidak menyerap premium, dianggap bahwa masyarakat seolah-olah tidak membutuhkan lagi premium," ujar Diah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen, Kamis (20/1/2022).

Padahal, tambah Anggota Fraksi PKS DPR RI ini, di lapangan, usaha kecil menengah seperti tukang ojek, tukang jual

gorengan, dan lain-lain adalah mereka yang sebagian besar membutuhkan bahan bakar jenis premium untuk transportasi. Angkutan angkutan umum pun diklaim masih banyak menggunakan premium.

"Justru yang dikeluarkan adalah ketidakadaan premium. Jadi angka kecil ini turunnya premium yang sampai 34 persen ini memang menjadi tanda tanya. Ya angkanya memang kecil, tapi kalau misalnya dipasoknya tidak merata atau terlambat atau apapun alas an lainnya, sehingga akhirnya di lapangan masyarakat atau rakyat ini tidak punya pilihan lain, kecuali mengalihkan kebutuhan bbm-nya dari premium ke pertalite," tambah Diah.

Dengan kondisi itu, ia juga mempertanyakan Pertamina yang mulai tidak menjual

premium. Bahkan di banyak tempat juga menjual dengan BBM jenis Pertamina atau Pertalite atau Peralite.

"Padahal yang paling ingin diaksyes oleh masyarakat kebanyakan ini masih menggunakan premium. Saya kira masih terlalu jauh untuk kita berbicara tentang pengurangan emisi karbon karena dianggap premium tidak ramah lingkungan," tambahnya.

Jika bangsa ini ingin menuju ramah lingkungan, Diah klaim dalam aspek-aspek yang lain masih bisa juga mengurangi emisi karbon dalam usaha-usaha yang lain.

Tetapi, kalau terkait dengan bahan bakar minyak, BBM jenis premium, menurut Diah, masih menjadi kebutuhan yang sangat besar di tengah masyarakat.

"Saya kira ini perlu dikaji betul mengenai alasan turunnya angka realisasi ini," tutupnya.

Diketahui, Kementerian ESDM akan memberikan kompensasi atas penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang diproduksi PT Pertamina (Persero) seiring dengan



Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol

Anggota Komisi VII DPR RI

"Justru yang dikeluhkan adalah ketidakadaan premium. Jadi angka kecil ini turunnya premium yang sampai 34 persen ini memang menjadi tanda tanya. Ya angkanya memang kecil, tapi kalau misalnya dipasoknya tidak merata atau terlambat atau apapun alas an lainnya, sehingga akhirnya di lapangan masyarakat atau rakyat ini tidak punya pilihan lain, kecuali mengalihkan kebutuhan bbm-nya dari premium ke pertalite,"

terhapusnya Premium di masa mendatang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan BBM Premium secara natural akan menghilang,

diganti dengan BBM yang lebih ramah lingkungan.

"Premium itu secara natural akan habis, kemudian Pertalite akan muncul," katanya, Rabu (19/1/2022).

HNW Tolak Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin di Kemensos dan Fokus Atasi Bansos

KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Kementerian Sosial

yang menghapuskan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos.

Hidayat juga menolak penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial yang telah dimungkinkan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2021.

“Jika Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial yang sangat diperlukan untuk persiapan dan peningkatan kinerja Kemensos dihapus, juga Ditjen PFM yang selama ini mengelola anggaran bansos terbesar di Kementerian Sosial dihapus dengan alasan perampingan organisasi, sementara disaat yang sama dibuka peluang munculnya

jabatan baru Wakil Menteri Sosial padahal tidak dibutuhkan, maka tentu ini hal yang tidak rasional, dan tidak sesuai dengan prinsip birokrasi yang ramping dan efektif sebagaimana yang dijanjikan Presiden Jokowi,” ujar Hidayat pasca Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, Rabu (19/01/2022).

Politisi yang akrab disapa HNW ini mengingatkan, Ditjen PFM di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 45 Triliun untuk dua program bansos utama Kemensos, yakni Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Di tahun 2021 dimana kasus covid-19 memuncak, bahkan Ditjen tersebut juga mengelola bansos tunai,

bansos sembako PPKM, dan program sembako kemiskinan ekstrem. Meskipun masih terdapat beberapa evaluasi, keseluruhan bansos tersebut telah berhasil disalurkan kepada lebih dari 95% keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

HNW khawatir, jika Ditjen PFM dihapuskan dan program-programnya dileburkan ke dalam struktur Kemensos lainnya, maka akan ada proses penyesuaian dan adaptasi yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi semakin terkendala dan waktu yang makin panjang, dengan akurasi yang bermasalah, sementara Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat jumlah dan keperlunya.

“Apalagi Bu Menteri Sosial ketika hari ini menjelaskan ke Komisi VIII DPR-RI terkait konsep peleburan bansos dari Ditjen PFM ke Ditjen lainnya juga masih sangat abstrak, dan menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR, hingga diminta untuk menyampaikan kembali secara tertulis dan lebih sistematis, dan akan dilaksanakan FGD



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Jika Ditjen PFM dihapuskan dan program-programnya dileburkan ke dalam struktur Kemensos lainnya, maka akan ada proses penyesuaian dan adaptasi yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi semakin terkendala dan waktu yang makin panjang, dengan akurasi yang bermasalah, sementara Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat jumlah dan keperlunya.”

khusus untuk membahas dan merumuskan masalah tersebut,” sambungnya.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak agar Menteri Sosial lebih fokus mengatasi beragam persoalan yang ada di Kemensos, dan tidak menambah persoalan baru

dengan menghapuskan Ditjen PFM dan mencari-cari bentuk baru penyaluran bantuan sosial yang masih spekulatif ditengah kondisi sosial akibat covid-19 yang makin berat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Urus Wakaf, Anggota Komisi VIII DPR Usul Pembubaran BWI

KUTIPAN

Jakarta (22/01) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengkritik struktur kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dinilai gemuk.

Diisi oleh 25 anggota untuk pengurusan 2021-2024 sementara hanya diberikan anggaran Rp.8 Miliar dari Pemerintah, membuat politisi PKS ini mempertanyakan efektifitas kinerja lembaga tersebut.

"Saya pikir BWI ini terlalu besar di kepala, sedangkan badannya kecil. Saya akui lembaga ini memiliki gagasan besar tentang wakaf, namun dari 25 orang ini berapa yang bekerja? Saya yakin, dengan model struktur kelembagaan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah wakaf," kritik Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kamis (21/1/2022).

Anggota DPR Fraksi PKS ini menilai pemerintah tidak serius dalam mengelola wakaf

di Indonesia sehingga dirinya mengusulkan agar BWI dibubarkan.

Bukhori juga menyinggung masalah kelembagaan BWI yang terkesan menjadi objek rangkap jabatan oleh pejabat Kementerian Agama.

"Berkali-kali disampaikan, persoalan wakaf ada pada nazhirnya. Wakaf kita bisa berdaya, produktif, dan profesional karena kinerja nazhirnya. Selain itu, pemerintah melalui Kemenkeu pernah mengatakan bahwa wakaf tunai berpotensi untuk membantu pertumbuhan ekonomi, namun kenapa Kemenkeu enggan mengurus hal ini?" ujarnya.

Legislator Dap Jatieng 1 ini menambahkan, dirinya pesimis melihat model badan wakaf seperti itu. Peralnanya,

dengan struktur kelembagaan yang gemuk, ditambah anggaran dari pemerintah yang minim, dinilai hanya akan membuat program strategis wakaf yang telah dicanangkan menjadi tidak realistis untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, Bukhori mengusulkan kepada pemerintah supaya struktur kelembagaan BWI didesain secara rasional.

"Saya usulkan kepada pemerintah supaya rasional, terutama Kementerian Agama. Jangan jadikan BWI sebagai tempat duduk kedua.

Semuanya dari sana, akhirnya yang kerja tidak ada. Saya pun pesimis melihat model badan wakaf seperti ini. Bayangkan dengan anggaran hanya Rp8 Miliar, diisi oleh 25 anggota, ditambah program dengan berbagai divisinya, lalu berapa bagiannya? Untuk program literasi saja belum tentu tercover. Maka bisa dikatakan, lembaga ini diberikan tugas yang besar, tapi dibuat sulit bergerak," paparnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Bukhori mempertanyakan perkembangan realisasi



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Masyarakat mengeluh. Mereka terpaksa melakukan sertifikasi tanah wakaf dengan uang pribadi. Padahal BWI dibentuk salah satunya untuk pecahkan masalah itu dan bisa memberi harapan untuk selesaikan persoalan umat Islam."

program sertifikasi tanah wakaf sebanyak 163.334 bidang tanah yang dicanangkan oleh BWI pada 13 September 2021 silam. Sebab, Bukhori menerima sejumlah keluhan masyarakat

yang belum merasakan manfaat dari kinerja BWI terkait program sertifikasi tanah wakaf. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Raker dengan Menteri Agama, Aleg PKS: Soal Inpassing, Kemenag Harus Segera Penuhi Haknya

● KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama menilai, soal Inpassing harus lebih didalami terlebih dahulu jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat.

“Saya meminta komitmen Pak Menteri Agama, khususnya terkait Inpassing yang sudah satu tahun belum direalisasikan. Membangun Ibu Kota Negara baru saja itu sanggup, tapi kenapa ini yang jumlah nya tidak seberapa terlampau lambat. Oleh karena itu saya minta agar ini dapat segera diselesaikan. Saya juga akan mengirimkan permintaan mereka kepada sekjen Kementerian Agama untuk bisa mengatur waktu bertemu dengan Pak Menteri”, ujar Iskan.

Aleg asal Sibuhuan ini menambahkan bahwa soal Inpassing itu jangan sampai ada keterlambatan lagi untuk pembayarannya, kurang lebih sudah satu tahun ini kita

menunggu.

“Kepada Pak Menteri Agama saya berharap khususnya soal Inpassing ini segera dapat direalisasikan karena sudah satu tahun lebih rakyat kita menunggu, jangan sampai nantinya kita tidak memenuhi hak-hak rakyat kita. Karenanya saya akan mengawasi terus komitmen dari Pak Menteri ini agar dapat segera direalisasikan untuk Inpassing tersebut”, tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan terkait 10 juta Sertifikat Halal bisa diusulkan di daerah kita khususnya untuk makanan ini harus jelas halalnya jangan sampai tidak ada kejelasan.

“Terkait soal 10 juta

Sertifikat Halal ini harus bisa jelas keasliannya, khususnya pada makanan yang beragam di daerah saya itu. Oleh karena itu kita harus usulkan soal 10 juta sertifikat halal ini untuk mengembangkan para wisatawan di daerah-daerah yang seperti dapil saya. Jangan sampai 10 juta sertifikat halal ini tidak jelas. Saya menambahkan juga terkait Penyuluh, di Kabupaten Toba itu sebanyak 35 orang ingin sekali kita untuk membuat acara disana. Dan tentang Upah mereka disana saya inginkan Kepada Menteri Agama untuk secara bertahap dinaikan jumlahnya dan harus menyesuaikan juga dengan APBN kita”, pungkas Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

“Kepada Pak Menteri Agama saya berharap khususnya soal Inpassing ini segera dapat direalisasikan karena sudah satu tahun lebih rakyat kita menunggu, jangan sampai nantinya kita tidak memenuhi hak-hak rakyat kita. Karenanya saya akan mengawasi terus komitmen dari Pak Menteri ini agar dapat segera direalisasikan untuk Inpassing tersebut”



Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan

Datangi Unjuk Rasa Ribuan Buruh, Aleg PKS **Tegaskan** Komitmen Bantu Perjuangan Tolak UU Cipta Kerja

KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendatangi ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang terdiri dari sejumlah aliansi dan federasi buruh daerah, dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (26/01).

Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar dan Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS DPR RI, Anshory Siregar dan Amin, Ak. langsung menyambut ratusan buruh yang sudah hadir dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hari.

Dalam orasinya, Anshory mengatakan pihaknya turut memahami dan mendukung aksi unjuk rasa karena bagian dari cinta NKRI.

"Saya Anshory Siregar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, memahami dan mendukung aksi unjuk rasa, aksi demo temen-temen buruh semuanya. Karena Perjuangan

temen-temen semua adalah perjuangan ideologis kita bersama demi NKRI" ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Anshory, sejak awal Fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas dan lantang RUU Omnibus Law.

"Makanya dengan tegas dan lantang batalkan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Batalkan.. Batalkan. Dan kami konsisten dalam penolakan dan pencabutan Undang-undang Omnibus Law. Batalkan." tegas Anggota DPR RI dari Dapil Sumut III ini.

Fraksi PKS, imbuhnya, akan terus memperjuangkan

penolakan Undang-undang Omnibus Law sampai terbitnya Perpu dari Pemerintah.

"Kami akan terus perjuangan sampai terbit. Sampai pemerintah menerbitkan perpu pembatalan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tanpa melibatkan akademisi, masyarakat luas, para buruh. Oleh karena itu bisa dikatakan Undang-undang Omnibus Law cacat formil," tandasnya penuh semangat.

Sementara Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., mengapresiasi segala tuntutan para buruh demi tegaknya Keadilan dan Kesejahteraan bagi para buruh.

"Melalui mimbar ini saya mengajak teman-teman DPR dan Pemerintah untuk bisa fokus pada keputusan MK nomor 91 tahun 2020. Karena berdasarkan keputusan MK Undang-undang ini prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011. Oleh karena itu yang harus diubah adalah undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," terang Anggota



H. ANSHORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Sejak awal Fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas dan lantang RUU Omnibus Law. Makanya dengan tegas dan lantang batalkan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Batalkan.. Batalkan. Dan kami konsisten dalam penolakan dan pencabutan Undang-undang Omnibus Law. Batalkan"

Komis VI DPR RI ini.

Usai mendatangi unjuk rasa ribuan buruh di depan Gedung DPR RI Senayan, Fraksi PKS DPR RI memberikan kesempatan 20 orang perwakilan dari para buruh

untuk beraudiensi dan berdialog dengan Anggota Fraksi PKS DPR di lantai 3 Ruang Rapat Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.

Politisi PKS Kutuk Keras Tindakan Eksploitasi Manusia dalam Dunia Ketenagakerjaan

KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, mengutuk keras dugaan tindakan Bupati Non Aktif Langkat yang terjaring KPK, karena dugaan melakukan perbudakan dengan mengkrakeng pekerja di dalam rumah bupati.

"Sangat mengkhawatirkan, dan saya mengutuk keras atas tindakan perbudakan ini, karena hal ini sama seperti eksploitasi manusia (penjajahan)." Ucap Alifudin, Selasa (25/01/2022).

Alifudin juga merasa kaget, bahwa di negara yang sudah merdeka ini masih ada pekerja yang dikrangkeng, lalu diperbudak untuk melakukan pekerjaan kasar dan dalangnya diduga adalah orang nomor 1 di daerah langkat atau bupati non aktif.

"Saya berharap, aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan masyarakat harus bersama mengawal kasus ini, karena jika tidak di investigasi

lebih dalam dan tidak diselesaikan kasus ini, maka khawatir akan muncul kejadian yang sama ini" tambah Alifudin

Ketua BPW Kalimantan DPP PKS ini pun meminta kepada Kemenaker dan Komnas HAM agar bisa membuat kolaborasi program dalam mencegah kejadian perbudakan para pekerja, atau eksploitasi para pekerja.

"Dari kejadian ini kita harus belajar, bahwa, pencegahan itu penting, atau membuat posko bersama aduan para pekerja di setiap daerah agar tidak adanya pelanggaran HAM di dunia Ketenagakerjaan Indonesia" tegas bang Alifudin.

Sebelumnya diberitakan, Bupati nonaktif Langkat, Sumatera Utara, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Terbit Rencana Perangin-Angin, diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan orang.

Dugaan itu diungkap Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, yang menerima laporan tentang adanya kerangka manusia serupa penjara (terbuat dari besi dan digembok) di dalam rumah bupati yang kini berstatus nonaktif tersebut.

Migrant Care kemudian melaporkan hal itu ke Komnas HAM, Senin (24/01/2022).



H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

"Saya berharap, aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan masyarakat harus bersama mengawal kasus ini, karena jika tidak di investigasi lebih dalam dan tidak diselesaikan kasus ini, maka khawatir akan muncul kejadian yang sama ini"

Desak Pemerintah Akui Eksistensi PRT, Wakil Ketua FPKS: **Wujudkan** dalam Bentuk UU PPRT

KUTIPAN

Jakarta (17/01) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani meminta pemerintah memberikan pengakuan atas eksistensi pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

"Tentu saja pengakuan negara ini harus ditindaklanjuti dengan melindungi pekerja rumah tangga yang sangat rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Para PRT juga harus mendapatkan jaminan sosial saat mereka sakit dan saat mereka mendapatkan masalah seperti saat pandemi" ungkap Netty saat memberi sambutan dalam Webinar yang bertajuk 'APA KABAR RUU PPRT (Perлиндungan Pekerja Rumah Tangga?)' pada Minggu (16/1).

"Selama ini masih banyak PRT bekerja dalam situasi yang tidak layak, jam kerja panjang, bangun pukul 04.000 tidur pukul 24.00, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial baik jaminan kesehatan

maupun ketenagakerjaan. Tambahan lagi beban kerja yang tak terbatas, rentan terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan yang dapat digolongkan sebagai praktik-praktik perbudakan modern," kata Netty.

Fraksi PKS kata Netty berkomitmen untuk mendorong segera ditutuskannya pembahasan RUU PPRT menjadi sebuah UU.

"Terkait RUU PPRT ini negara memiliki kewajiban dan juga harus menjalankan amanat konstitusi bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam mengupayakan penghidupan yang layak ini setiap pekerjaan juga berhak dilindungi oleh negara tanpa terkecuali para

PRT," katanya.

Menjadi sebuah kebutuhan, imbuhnya, agar RUU PPRT segera ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI karena sudah diperjuangkan sejak tahun 2004 atau 18 tahun yang lalu.

"Komunikasi secara intensif harus dilakukan kepada pimpinan DPR RI, para pimpinan fraksi, dan badan legislasi agar RUU ini mendapat dukungan secara luas" tambahnya.

Dalam sambutannya, Ketua Jala PRT, Lita Anggraeni memaparkan bahwa RUU PPRT mendesak untuk disahkan menjadi UU.

"Hubungan antara PRT dan pemberi kerja ini harus dilihat negara sebagai sesuatu yang mendesak dan penting untuk diperhatikan" kata Lita Anggraeni.

"Kita bicara pada situasi kerja PRT, bahwa selama ini PRT bekerja dalam situasi yang tidak layak di mana jam kerja panjang, tidak ada libur, kemudian juga tidak ada jaminan sosial kesehatan ketenagakerjaan, kemudian beban kerja tak terbatas dan rentan juga akan eksploitasi



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

"Terkait RUU PPRT ini negara memiliki kewajiban dan juga harus menjalankan amanat konstitusi bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam mengupayakan penghidupan yang layak ini setiap pekerjaan juga berhak dilindungi oleh negara tanpa terkecuali para PRT"

tindak kekerasan yang bisa dikatakan sebagai praktik-praktik perbudakan modern" katanya.

Hadir juga dalam acara webinar tersebut sejumlah tokoh yakni Ketua Fraksi PKS DPR RI,

Jazuli Juwaini, Akademisi UI Heru Susetyo, Ketua Jala PRT Lita Anggraeni, serta kalangan akademisi, jaringan PRT, jurnalis, mahasiswa, politisi, dan masyarakat umum.

Aleg PKS Minta **Prioritaskan** Vaksin Covid-19 Halal dan MUI Dilibatkan Intensif dalam Pengadaannya

KUTIPAN

Jakarta (15/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan pihaknya selalu meminta kepada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Pengawasan (BPOM), dan PT Bio Farma (Persero) untuk memprioritaskan penggunaan jenis vaksin halal.

Menurutnya, ketiga lembaga tersebut merupakan stakeholder yang bertanggungjawab dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, Mufida juga meminta agar jumlah vaksin yang memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus lebih diperbanyak. Hal ini mengingat jumlah penduduk di Indonesia mayoritas muslim.

"Kami minta jumlah pengadaan vaksin yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI seperti Sinovac itu harus diperbanyak, sementara yang tidak punya itu diperkecil," kata Kurniasih saat menjadi

narasumber dalam Dialog Aktual yang bertajuk "Vaksin Halal untuk Umat" secara virtual bersama Aktual.com di Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Ia pun turut menyoroti tidak adanya vaksin halal dalam program vaksin booster atau dosis ketiga yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan animo masyarakat, khususnya umat muslim.

"Harusnya Sinovac masih di program booster, karena sudah punya sertifikat halal. Jadi nanti dikhawatirkan animo masyarakat malah turun," ujarnya.

Anggota DPR fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, kehadiran MUI dalam proses pengadaan vaksin di Indonesia sangat penting. Untuk itu, ia pun meminta MUI dilibatkan sejak awal, sehingga lembaga tersebut bisa melihat apa saja komponen-komponen produksi vaksin.

Menurut Kurniasih, proses pengadaan vaksin di Indonesia harus memperhatikan dua hal. Pertama, Halalan yaitu dapat menjamin sertifikat halal dari MUI. Kedua, Toyyiban yaitu dari sisi efisiensi atau tingkat kemanjuran. Sebab program vaksinasi ini harus dimonitor sampai terdistribusi ke masyarakat.

"Kita akan terus dorong supaya vaksin halalan dan toyyiban diprioritaskan," tegas dia.

Melihat banyaknya permasalahan dalam program vaksinasi tersebut, Kurniasih mengungkapkan Komisi IX DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Vaksin. Namun, ia belum bisa memastikan kapan Panja itu mulai bekerja, mengingat saat ini masih ada dua Panja yang masih berjalan.

"Kita akan bikin Panja



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Ketiga lembaga tersebut merupakan stakeholder yang bertanggungjawab dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Mufida juga meminta agar jumlah vaksin yang memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus lebih diperbanyak. Hal ini mengingat jumlah penduduk di Indonesia mayoritas muslim

vaksin, tapi berhubung saat ini masih ada dua Panja, jadi kita selesaikan dulu. Begitu dua

Panja ini sudah selesai, baru kita bentuk Panja Vaksin," ungkap Kurniasih.

Wakil Ketua Komisi X FPKS Desak Penyelesaian Guru Honorer **Harus Menyeluruh**

KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS mendesak penyelesaian bagi guru honorer sejak era PP 48/2005 hingga sekarang masih berlarut-larut.

“Bagaimanapun opsi bagi honorer sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, yakni diangkat PNS, rekrutmen PPPK, atau diangkat pegawai dengan honor sesuai UMP/K” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Selasa (19/01/2022).

Fikri mengungkapkan sejak tahun 2014, ada 438 ribu tenaga honorer yang belum jelas penyelesaiannya.

“Diantara mereka terdapat guru honorer sebanyak 157 ribu orang dan 86 ribu dosen honorer yang butuh kejelasan status,” kata politisi PKS ini.

Ratusan ribu tenaga honorer tersebut masih terkatung-katung nasibnya sejak PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diterbitkan. Hingga 9 tahun kemudian,

tepatnya pada 2014 penyelesaian tenaga honorer masih tersisa 438 ribu orang, tidak terkecuali guru honorer.

“Jeritan para guru honorer sudah hampir tiap saat harus kita dengar di komisi X, bagaimana kita mau melangkah untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia, bila masalah guru honorer belum selesai juga,” ujarnya.

Dia menceritakan, di tengah gelombang aksi honorer menuntut status yang bertahun-tahun tidak jelas itu, pada 2018 silam, DPR bersama pemerintah sebenarnya telah menyepakati keputusan penting.

Menurut Fikri, sebanyak 438 ribu honorer yang masih tersisa diberi tiga opsi penyelesaian, yakni mengikuti seleksi PNS, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau diangkat pegawai dengan honor sesuai

UMP/K.

“Opsi ini tinggal dijalankan dan serius untuk selesai,” tegasnya.

Fikri menilai, bila revisi undang-undang ASN dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian guru honorer, maka hal itu ibarat memberi harapan yang tidak jelas.

“Ini soal keseriusan kita dalam menyelesaikan, karena setiap kali penyelesaian honorer, malah timbul masalah baru,” terangnya.

Dia menyinggung soal permasalahan yang timbul dalam rekrutmen PPPK bagi guru honorer digelar. Guru honorer yang telah lama bertugas, kalah bersaing dan gagal lolos seleksi karena harus bersaing dengan guru-guru baru dan lulusan perguruan tinggi yang lebih muda usia dan kemampuan kognitifnya.

“Akibatnya honorer lama tetap tidak terekruk, padahal rekrutmen PPPK seharusnya jadi prioritas untuk menyelesaikan status bagi honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun,” kata dia.

Selain itu yang terbaru, guru-guru dari sekolah swasta yang lolos seleksi PPPK



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Jeritan para guru honorer sudah hampir tiap saat harus kita dengar di komisi X, bagaimana kita mau melangkah untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia, bila masalah guru honorer belum selesai juga

menyebabkan sekolah-sekolah swasta tempat asal mereka mengajar menjadi terancam kekurangan guru.

“Ada sekolah yang dari guru totalnya ada 40 orang, tinggal 15 guru saja,” kisah dia mencontohkan.

Sehingga asosiasi Pendidikan meminta agar guru-guru swasta yang lolos seleksi PPPK dikembalikan ke tempat

asal dia mengajar.

Namun hal tersebut bakal melonggar ketentuan perundangan. Pasalnya, UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan definisi, bahwa PPPK digaji oleh pemerintah dan bekerja pada instansi pemerintahan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

IKN Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Saat Pemerintah mempercepat pembahasan terkait pemindahan ibukota dengan anggaran hampir 500 Triliun Rupiah, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdikan belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraannya.

"Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan." Kritik Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Persoalan guru honorer, kata Ledia, ibarat sebuah drama berseri yang tak kunjung usai. Bertahun-tahun persoalan guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta terus mendulang isu pedih dan kritik.

"Secara kesejahteraan

nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan," ungkapnya.

Namun, tambah Ledia, Pemerintah kemudian menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Sebagai gantinya Pemerintah meminta para guru honorer untuk mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada 2021 yang direvisi menjadi bertahap, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi, proses pelaksanaan yang memunculkan kesulitan bagi para peserta seleksi, kriteria penilaian yang dianggap tidak adil hingga ancaman ketidakadilan bagi sekolah swasta dan guru honorer tak lolos seleksi usai pengumuman kelulusan seleksi PPPK.

"Pemerintah nampak tidak matang dalam mempersiapkan proses seleksi PPPK ini. Selain beberapa bagian proses seleksi yang dianggap menyulitkan dan tidak adil, adanya kebijakan yang berubah, direvisi, bahkan buruknya komunikasi dengan Pemda yang membuat banyak Pemda tidak mengajukan formasi guru juga menjadi satu paket masalah yang harus sesegera mungkin dievaluasi Pemerintah sebelum memutuskan seleksi tahap berikut di 2022 ini." Kata Ledia



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.II

Anggota Komisi X DPR RI

"Secara kesejahteraan nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan,"

Memasuki tahun 2022, persoalan guru honorer nampaknya masih tak kunjung usai. Usai penyetoran seleksi PPPK pada

2021 ternyata bermunculan pula masalah-masalah baru. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



IKN Ratusan Triliun Dikebut

Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Nasib



Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan



**LEDIA HANIFA
AMALIAH**

Anggota Komisi X DPR RI

Raker dengan Menkeu, Aleg PKS **Ingatkan** Pemerintah Tak Bisa Gunakan Dana PEN Untuk Pembiayaan IKN

KUTIPAN

Jakarta (21/01) --- Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/01/2022).

Rapat kerja ini membahas Evaluasi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021, serta Rencana Program PEN Tahun 2022.

Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam rapat kerja ini menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih pemerintah pada tahun 2021. Bersama dengan itu, ia juga memberikan beberapa masukan.

Hal pertama yang ditanggapi Anis, terkait dengan Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita. Ia mengatakan bahwa ketika kita ingin menilai kinerja kita, maka akan lebih nampak capaiannya ketika disandingkan dengan capaian negara lain. Anis

mengemukakan data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyandingkan capaian GDP per kapita Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand. Pada rentang tahun 1970-1996 (sebelum krisis moneter), grafik Indonesia melandai.

Kalaupun ada kenaikan, naiknya hanya sedikit sekali. Sementara pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Thailand meroket. Pada tahun 1996, GDP per kapita Indonesia hanya 1.100 USD, sementara Thailand menjadi 3.000 USD, dan Malaysia nyaris 5.000 USD.

Setelah krisis moneter pada rentang tahun 1999-2011, Indonesia relative bisa sama pertumbuhannya dengan

Malaysia dan Thailand, dimana grafiknya terus naik. 2012-2020, grafik kita melandai lagi. Sementara Malaysia dan Thailand, meski sempat turun naik, terus meroket.

Pada tahun 2020, saat GDP Malaysia sudah di angka 10.400 USD per kapita per tahun dan Thailand sudah 7.000 USD, Indonesia masih di angka 3.800 USD.

"Perbandingan ini baik untuk evaluasi kesejahteraan masyarakat kita" ujar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan dengan GDP Malaysia yang jauh diatas Indonesia, maka sangat wajar jika banyak diantara rakyat Indonesia yang tergiur untuk mengadu nasib di negara tetangga.

"Hal ini mungkin yang menjelaskan mengapa 3 juta lebih rakyat Indonesia mencari nafkah di Malaysia," papar Anis.

Anis mengingatkan pemerintah agar tidak asyik dengan data dan capaiannya



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

"Pemerintah agar tidak asyik dengan data dan capaiannya sendiri, kemudian lupa bahwa data itu ternyata masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Realita di lapangan, angka-angka capaian yang disampaikan pemerintah nyatanya belum berdampak signifikan untuk kehidupan rakyat. Masih sangat banyak rakyat yang hidup susah, Bagaimanapun, APBN merupakan instrument kesejahteraan rakyat"

sendiri, kemudian lupa bahwa data itu ternyata masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Realita di lapangan, angka-

angka capaian yang disampaikan pemerintah nyatanya belum berdampak signifikan untuk kehidupan rakyat.

Aleg PKS: Lembaga Perbankan Perkuat Keamanan Siber

KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Keamanan siber merupakan aspek yang penting dalam industri perbankan karena gelombang digitalisasi, regulasi, dan pandemi Covid-19.

Menjadi keharusan bagi perbankan untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber setiap kali perbankan meningkatkan infrastruktur digital.

Menanggapi hal itu, Junaidi Auly Anggota Komisi XI DPR RI meminta semua industri perbankan menjamin jaringan dan data dari pencurian. Kegagalan untuk mengamankan data dengan benar dapat mengakibatkan kerugian dan sangat merusak kehidupan digital bank secara keseluruhan.

"Industri ini sangat ditargetkan oleh penjahat dunia maya, adapun peningkatan standar keamanan siber menjadi salah satu alternatif dalam rangka mengantisipasi ancaman peretasan sistem" ujar Junaidi dalam rilis yang diterima. Senin (24/01/2022)

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS ini mengatakan

perubahan pola kerja dan bisnis perbankan pada saat pandemi tentu mendorong digitalisasi, namun organisasi perbankan harus berhati-hati dan responsif terhadap ruang-ruang ancaman penggunaan berbagai platform.

Pria asal Lampung ini mengingatkan regulator industri perbankan untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah ancaman siber dimasa depan, karena ancaman tersebut tidak hanya mempengaruhi aset nasabah tetapi juga reputasi industri keuangan dan regulator secara bersamaan.

"Diharapkan regulator perbankan bukan saja hadir, tapi harus mendorong dan mendukung lingkungan digital perbankan. Jangan sampai regulator malah ketinggalan kereta sehingga upaya antisipasi atau mitigasi kejahatan siber tidak optimal," tutup Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

"Kegagalan untuk mengamankan data dengan benar dapat mengakibatkan kerugian dan sangat merusak kehidupan digital bank secara keseluruhan. Industri ini sangat ditargetkan oleh penjahat dunia maya, adapun peningkatan standar keamanan siber menjadi salah satu alternatif dalam rangka mengantisipasi ancaman peretasan sistem"

Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual



Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual.

Bahkan mengingat semakin tingginya eskalasi kejahatan seksual dan adanya kecenderungan dilakukan secara keji dan tidak manusiawi, juga dilakukan dengan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka Fraksi PKS mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual.

Fraksi PKS juga sangat mendukung terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI





Fraksi PKS Tolak RUU TPKS Bukan karena Tak Setuju Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual

KUTIPAN

Jakarta (18/01) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual dan mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Fraksi PKS juga sangat mendukung perlindungan terhadap korban kejahatan seksual yang mayoritasnya adalah perempuan," jelas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Oleh karena itu, imbuhan Mufida, Fraksi PKS juga mendukung pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bukti keseriusan Fraksi PKS untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga yang mayoritas perempuan dari tindakan

diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

"Di sisi lain, Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinahan dan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja Indonesia yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi," tegas Anggota Komisi IX DPR RI.

Bahkan, imbuhnya, kekerasan fisik dan seksual seringkali terjadi dalam hubungan pacaran. Selain itu, fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS.

"Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Fraksi

PKS mengusulkan agar RUU tentang TPKS ini juga mengakomodasi norma larangan perzinahan dan penyimpangan seksual," pungkasinya.

Pengaturan tentang Tindak Pidana Perzinahan ini, kata Mufida, dengan memperluas rumusan delik zina agar mencakup perzinahan yang dilakukan oleh yang sudah terikat perkawinan dengan yang bukan suami/istrinya, maupun yang belum terikat perkawinan.

"Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan untuk memasukan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang (LGBT) dengan mengakomodasi pidanaanaa bagi pelaku penyimpangan seksual, melarang segala bentuk kampanye penyimpangan seksual, dengan memberikan pengecualian bagi pelaku penyimpangan seksual karena kondisi medis tertentu yang harus direhabilitasi," paparnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"kekerasan fisik dan seksual seringkali terjadi dalam hubungan pacaran. Selain itu, fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS."



Baleg FPKS: BUMN Khusus Perlu Diatur dalam Rancangan Undang-undang

KUTIPAN

Jakarta (21/01) --- Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta proses harmonisasi RUU BUMN mengatur beberapa hal strategis tentang pengelolaan keuangan, perpindahan status kepemilikan aset dan aturan BUMN Khusus.

Mulyanto prihatin diri seratusan lebih BUMN yang ada ternyata hanya sepuluh BUMN yang mampu menyumbang 85 persen dari keuntungan total.

"Sementara itu BUMN beranak-pinak menggurita dengan anak dan cucu perusahaan," ujar Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, RUU BUMN yang segera diharmonisasi ini harus dapat memberikan rambu-rambu yang tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Jangan sampai BUMN yang ada ini jadi kerajaan tersendiri, negara di dalam negara dan tidak memberikan daya-guna yang optimal bagi pembangunan bangsa. Karena total anggaran seluruh BUMN

per tahun kurang lebih sama dengan APBN. Belum lagi terkait dengan nilai aset-asetnya," kata Mulyanto dalam Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI terkait Harmonisasi RUU BUMN Rabu (19/01/2022).

"Selain itu jumlah BUMN perlu dikurangi dan diperjelas definisi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sehingga kita memiliki persamaan persepsi terkait pengelolaan keuangan negara.

Jangan sampai keuangan negara yang 'dipisahkan' dalam BUMN terbawa ke dalam anak Perusahaan BUMN, lalu semakin tidak terawasi oleh negara," lanjut Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu juga menyoroti, soal

peralihan aset BUMN yang merupakan Barang Milik Negara (BMN). Menurutnya aset ini tidak boleh sembarangan dialihkan dari BUMN kepada Anak Perusahaan BUMN.

"Soal tersebut harus jelas diatur dalam RUU BUMN ini, karena aset BUMN itu adalah BMN," jelasnya.

Ditambahkannya juga, bahwa perlu dipertimbangkan istilah BUMN Khusus, sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan BUMN sektor minyak dan gas bumi dalam UU Migas yang mempunyai mandat khusus sebagai doers (pelaku) sekaligus regulator.

Untuk diketahui Komisi VI DPR RI telah mengajukan ke Baleg DPR RI, RUU BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah masuk sebagai RUU prioritas Prolegnas tahun 2022 untuk diharmonisasi menjadi RUU inisiatif DPR.

"RUU ini dimaksudkan akan mengamandemen UU No. 19/2003 tentang BUMN, yang telah berusia hampir dua puluh tahun. Istilah BUMN Khusus telah muncul di dalam RUU Cipta Kerja, RUU Energi Baru Terbarukan (EBT), dan RUU



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Badan Legislatif DPR RI

"Jangan sampai BUMN yang ada ini jadi kerajaan tersendiri, negara di dalam negara dan tidak memberikan daya-guna yang optimal bagi pembangunan bangsa. Karena total anggaran seluruh BUMN per tahun kurang lebih sama dengan APBN. Belum lagi terkait dengan nilai aset-asetnya"

Minyak dan Gas Bumi (Migas)," ungkap Mulyanto.

Kecuali Partai Golkar, yang meminta penundaan harmonisasi RUU BUMN ini, seluruh fraksi

DPR setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU BUMN sebagai usul inisiatif DPR dalam Panitia Kerja (Panja) di Baleg DPR RI.



Profil

- Nama Lengkap
Hj. Nevi Zuairina
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 20 September 1965
- Dapil
Sumatera Barat II



Pendidikan

- **SMAN 31 Jakarta Timur, DKI Jakarta**



Riwayat Organisasi

- **Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, 2010-2021**
- **Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua P2TP2A (Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)**
- **Ketua Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim Prov. Sumatera Barat**
- **Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua Forum PAUD Provinsi Sumatera Barat**
- **Ketua Ikatan Istri Kepala Daerah DPP Partal PKS**
- **Ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIN) Prov. Sumatera Barat**
- **Ketua PW himpaudi Sumbar**
- **Ketua YKI sumbar ketua PPTI sumbar**



Keluarga

- Suami : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. MSc**
- Anak : **3 Laki-Laki
7 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Wiraswasta**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



Media Sosial

- Facebook : **Nevi Zuairina**
- Twitter : **@nzualrina**
- Instagram : **@nevizuairina**
- Website : **<https://nevizuairina.id/>**

NEVI ZUAIRINA

- **Ketua forum UMKM sumbar**
- **Ketua Forum PAUD Sumbar**
- **Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Sumatera Barat**
- **Ketua Forlan Prov. Sumatera Barat**
- **Wakil ketua kadin bidang UMKM**
- **Penasehat Bundo kanduang Sumbar**
- **Penasehat Dharma Wanita Persatuan Prov. Sumatera Barat**
- **Penasehat BKMT sumbar**
- **Penasehat BKOW**
- **HIRA Aisyiyah cabang tebet**
- **Penasehat bundo kanduang IKM**



Rofik Hananto Realisasikan Program Aspirasi Lapangan Sekolah di Dapil

KUTIPAN

Purbalingga (17/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto melakukan advokasi atas aspirasi berupa Lapangan upacara sekaligus lapangan olahraga SMP Negeri 2 Kalimantan yang kini sudah menjadi lebih baik.

Hal itu terwujud setelah sekolah mendapat bantuan program aspirasi senilai Rp. 100 Juta dari Anggota DPR asal Dapil Jawa Tengah VII ini.

Dengan turunnya bantuan ini, Rofik berharap dapat memotivasi para guru dan siswa untuk terus meningkatkan prestasi sekolah.

"Alhamdulillah tahun ini kami berhasil membantu mengadvokasi pihak sekolah sehingga sekolah ini mendapatkan bantuan senilai 100 Juta untuk memperbaiki lapangan upacara sekolah yang juga digunakan untuk tempat berolahraga. Semoga dapat memotivasi para guru dan siswa untuk terus meningkatkan prestasi sekolah," jelas Rofik.

Kepala SMP Negeri 2 Kalimantan Tjandra Irawati

mengatakan, bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan pengembangan lapangan sekolah yang fungsinya sebagai lapangan upacara dan lapangan olah raga. Seperti untuk lapangan tenis, bola basket dan bulu tangkis.

"Karena kami hanya memiliki 1 lapangan. Selain digunakan untuk upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, juga untuk lapangan olah raga siswa. Tadinya lapangan itu ketinggiannya tidak sama antara lapangan untuk bermain bola basket dan bulu tangkis," katanya.

Hal ini tentu saja menyulitkan anak ketika mengikuti upacara atau pelajaran olah raga. Sebab di satu lapangan yang sama tetapi ketinggiannya berbeda. Kondisi ini juga bisa

membahayakan anak jika tidak hati-hati saat melangkah.

"Ketika mendapat bantuan dana aspirasi itu maka yang pertama kami lakukan adalah meninggikan lapangan yang masih rendah agar ketinggiannya sama dengan lapangan sebelah. Setelah itu lapangan dijadikan satu yang bisa digunakan untuk upacara, olah raga basket, tenis dan bulu tangkis," katanya.

Selanjutnya sekolah melakukan pengecatan lapangan menggunakan cat yang bagus dan awet yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Diharapkan dengan lapangan yang bagus ini lingkungan sekolah menjadi lebih tertata rapi dan indah.

"Dan diharapkan pula dapat meningkatkan prestasi siswa kami yang berjumlah 789 anak. Sebab sekolah sudah mempunyai lapangan olah raga yang representatif. Di samping itu diharapkan lapangan ini bisa menunjang kegiatan siswa ketika berkegiatan di lapangan," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Alhamdulillah tahun ini kami berhasil membantu mengadvokasi pihak sekolah sehingga sekolah ini mendapatkan bantuan senilai 100 Juta untuk memperbaiki lapangan upacara sekolah yang juga digunakan untuk tempat berolahraga. Semoga dapat memotivasi para guru dan siswa untuk terus meningkatkan prestasi sekolah,"





Berkegiatan di Dapil, Anis Bertemu Pengelola PAUD dan Kunjungi UMKM

KUTIPAN

Jakarta (15/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati, melakukan serangkaian kegiatan di dapilnya, Jumat (14/01/2022).

Kegiatan diawali dengan silaturahmi dan serah terima dengan para pengelola PAUD yang hadir menerima bantuan dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang di advokasi oleh Anis.

Sebanyak 14 perwakilan dari pengelola PAUD yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada Anis atas advokasi yang telah dilakukannya.

Berbagai bantuan berupa sarana pembelajaran seperti laptop, monitor, LCD, sound system hingga bahan renovasi bangunan, didapatkan oleh lembaga-lembaga ini.

Menyambi ucapan terima kasih dari para peserta, Anis mengatakan semua yang dilakukan merupakan tugas Wakil Rakyat.

"Advokasi yang saya lakukan merupakan bagian dari tugas saya sebagai Wakil Rakyat. Menyampaikan aspirasi masyarakat

merasakan kehadiran PKS di Jakarta Timur."

Dalam acara yang diselenggarakan di sekolah Mitra Ananda yang berlokasi di kawasan Cipinang Muara.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan lingkup kerja komisi XI dan fokus yang ditekuni Anis yaitu memajukan UMKM khususnya di daerah Jakarta Timur.

Namun demikian, walaupun ia tidak bertugas di komisi pendidikan, namun ia tetap memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan.

"Sebagai ibu, saya pendidik anak-anak saya. Sehingga saya tahu suka duka dalam pendidikan. Selain itu, saya juga seorang dosen yang memahami dinamika di dunia pendidikan. Dan saya sangat senang bisa membantu teman-teman di dunia pendidikan. Semoga membawa berkah

untuk kita semua," ungkapnya.

Secara khusus, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berkunjung ke salah satu lembaga penerima bantuan yaitu BKB PAUD Permata Hati yang berlokasi di Kampung Melayu, Jatinegara.

Di lokasi ini, Anis disambut oleh para guru yang sangat antusias menerima kedatangannya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

Dalam suasananya yang hangat dan ceria, ibu Haryanti sebagai kepala sekolah menceritakan sejarah dan perjalanan BKB PAUD Permata Hati yang telah berdiri selama 11 tahun dan diawali dari belajar dengan menggelar tikar tanpa bangunan.

Namun kegigihan para guru untuk memajukan PAUD sedikit demi sedikit menghasilkan buah dengan berdirinya bangunan PAUD. Adapun bantuan yang baru saja didapatkan dari PSBI berupa monitor LED, standing mic, sound system, dan laptop.

"Semuanya kami gunakan untuk proses pembelajaran," ujar Yanti.

Mengakhiri kunjungannya, Wakil Ketua Badan



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Sebagai ibu, saya pendidik anak-anak saya. Sehingga saya tahu suka duka dalam pendidikan. Selain itu, saya juga seorang dosen yang memahami dinamika di dunia pendidikan. Dan saya sangat senang bisa membantu teman-teman di dunia pendidikan. Semoga membawa berkah untuk kita semua,"

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyempatkan mampir dan berbelanja di rumah seorang pelaku UMKM, Yasmin, yang memproduksi bumbu-bumbu masakan padang seperti bumbu rendang, bumbu opor, bumbu gulai, dan lainnya.

Usaha rumahnya yang dilakukan turun temurun dari

orang tua ini, sangat membantu perekonomian keluarga mereka.

"Usaha ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM, bahwa usaha kecil yang dilakukan dengan tekun dan berkelanjutan, dapat diwariskan dan membawa kebaikan yang sangat panjang," pungkasi Anis.

Toriq Hidayat Jadi Pembicara Seminar IKADI-PUI Tasikmalaya Tentang Problematika Sosial

KUTIPAN

Toriq diundang sebagai Anggota Legislatif Pusat FPKS asal Dapil Jawa Barat XI di Masjid Besar Syu'latul Iman Ciawi, pada Ahad, (02/01/2022).

Tasikmalaya (12/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menghadiri seminar 'Sinergitas Komponen Keumatan Dalam Menghadapi Problematika Sosial' yang diadakan oleh organisasi Ikatan Dai Indonesia (IKADI) dan Persatuan Muslim Indonesia (PUI).

Toriq diundang sebagai Anggota Legislatif Pusat FPKS asal Dapil Jawa Barat XI di Masjid Besar Syu'latul Iman Ciawi, pada Ahad, (02/01/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Toriq menyampaikan materi mengenai permasalahan sosial di Indonesia.

Adapun Tokoh lain yang hadir sebagai pembicara adalah Ketua NU Kabupaten Tasikmalaya, Atam Rustam,

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto, dan Ketua IKADI-Ketua Detimda PUI Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Zulharman.

Toriq memaparkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh Indonesia khususnya pada masa pandemi.

"Kasus Penularan Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini sangat berdampak pada tatanan sosial masyarakat kita," kata Toriq.

Menurutnya, diantara permasalahan sosial yang ada saat ini adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya angka korban bencana, meningkatnya angka kejahatan kesusilaan dan kejahatan narkoba.

"Terus bertambahnya berbagai masalah sosial hingga

kini, mengharuskan Pemerintah bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut," ujar Toriq saat memaparkan materi tersebut.

Dia menambahkan, sinergitas seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan. Termasuk Partai Politik. PKS sebagai sebuah institusi politik telah memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan langkah konkrit atas dampak permasalahan Sosial.

"Salah satunya bentuk nyata yang dilakukan oleh Fraksi PKS adalah beberapa kali melakukan pemotongan gaji Anggota Dewan dari tingkat pusat hingga daerah. Untuk membantu masyarakat yang terdampak permasalahan sosial," tutup Toriq.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

"Diantara permasalahan sosial yang ada saat ini adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya angka korban bencana, meningkatnya angka kejahatan kesusilaan dan kejahatan narkoba. Terus bertambahnya berbagai masalah sosial hingga kini, mengharuskan Pemerintah bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut,"

Kundapil, Hermanto Serahkan Unit Pengolah Pupuk Organik di Tiga Daerah

KUTIPAN

Padang (25/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam rangkaian kunjungannya di daerah pemilihan menyerahkan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) bantuan pemerintah kepada petani di tiga daerah.

Tiga daerah yang beruntung tersebut adalah Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

"Anggap bantuan ini sebagai modal dari pemerintah untuk petani. Karena modal maka petani harus punya semangat untuk mengembangkannya," ujar Hermanto kepada para petani penerima bantuan UPPO.antuan UPPO terdiri dari 5 unsur yaitu alat pengolah pupuk organik, bangunan pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga, bangunan kandang sapi dan sapi 8 ekor. Dengan program UPPO, kotoran sapi diolah menjadi pupuk organik.

"Jadi target utama program ini adalah produksi pupuk organik," jelas Hermanto.

"Pupuk organik ini dibutuhkan untuk mengembalikan

unsur hara tanah yang sudah sangat berkurang di lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia selama puluhan tahun," papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Petani, lanjutnya, bisa memakai sendiri pupuk organik yang dibuatnya tersebut untuk menyuburkan lahan pertaniannya. "Atau menjual pupuk tersebut sebagai penghasilan," ucapnya.

Pada program UPPO ini terdapat sapi. "Sapi ini kalau dirawat dengan baik akan beranak pinak. Anak-anak sapi tersebut bisa dijual sebagai penghasilan juga," tutur Hermanto.

"Jadi dengan program UPPO, negara memfasilitasi petani untuk sejahtera dengan menjual: pupuk, sapi dan hasil panen

yang lebih baik karena tanah yang subur," pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kelompok-kelompok tani penerima bantuan kali ini adalah 2 kelompok tani Kota Padang, 5 kelompok tani di Kabupaten Solok dan 2 kelompok tani di Kabupaten Solok Selatan. Dua kelompok tani di Padang tersebut adalah Pisang Saiyo (Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah) dan Sawah Laweh (Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah).

Sedangkan 5 kelompok tani di Kabupaten Solok yaitu: Anugrah Tani Mandiri (Jorong Lambah, Nagari Aie Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang), Tanjung Harapan (Jorong Koto Tinggi, Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin), Bukik Gompong Sejahtera (Jorong Bukik Gompong, Nagari Koto Gadang Guguaq, Kecamatan Gunung Talang), Insan Sukses (Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang) dan Tampilin (Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas).

Adapun di Kabupaten Solok Selatan yaitu kelompok Sejahtera (Jorong Koto Sungai Kunyi, Nagari Sungai Kunyi,



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Petani bisa memakai sendiri pupuk organik yang dibuatnya tersebut untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Atau menjual pupuk tersebut sebagai penghasilan. Pada program UPPO ini terdapat sapi. Sapi ini kalau dirawat dengan baik akan beranak pinak. Anak-anak sapi tersebut bisa dijual sebagai penghasilan juga,"

Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Abai Sakato (Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari).

Dalam perjalanan di Kabupaten Solok Selatan, Hermanto didampingi oleh tokoh muda setempat Effendi

Muharram. Di Kabupaten Solok didampingi oleh tokoh setempat Roi Yurnades. Sedangkan di Padang didampingi Humas PKS Kecamatan Koto Tengah Zuprihal.

Koran Sumbang Akui Nevi Zuairina Politisi Perempuan Penggerak Ekonomi Kerakyatan

KUTIPAN

Menurut banyak pihak, pengakuan Padek itu pas dan tepat karena sebelum menjadi Anggota DPR RI hingga sekarang sebagai wakil rakyat Nevi selalu konsen menyuarakan dan memfasilitasi bahkan membantu pelaku usaha terutama UMKM di Sumbar, bahkan Nevi disebagian media menyebut sebagai Bunda UMKM Indonesia.

Jakarta (27/01) — Surat pengakuan disampaikan ke Nevi Zuairina dari Padang Ekspres koran terbesar di Sumatera Barat, Sabtu 22/1-2022.

Momentum Anniversary Padek 23 Tahun Selasa 25 Januari 2021, Anggota Komisi VI DPR RI dari PKS asal pemilihan Sumbar II menjadi satu dari tokoh yang memperoleh Anugerah Politisi Perempuan Penggerak Ekonomi Kerakyatan.

"Atas pengakuan ini, kami siap mempertanggungjawabannya," ujar Ketua Panitia Anniversary Padek, Romi

Delfiano pada surat pemberitahuan tersebut.

Menurut banyak pihak, pengakuan Padek itu pas dan tepat karena sebelum menjadi Anggota DPR RI hingga sekarang sebagai wakil rakyat Nevi selalu konsen menyuarakan dan memfasilitasi bahkan membantu pelaku usaha terutama UMKM di Sumbar, bahkan Nevi disebagian media menyebut sebagai Bunda UMKM Indonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nevi yang mengetahui dianugerahi langsung bersyukur

ternyata apa yang menjadi kerjanya sebagai wakil rakyat diapresiasi Padek yang merupakan koran beropolah terbesar di Sumbar.

"Ini surprise bulan pertama di 2022. Terus terang penghargaan Padek ini makin mencemati saya untuk terus lantang berteriak kepada semua komponen pemerintah untuk pro kepada ekonomi kerakyatan seperti UMKM," ujar Nevi Minggu (23/01/2022).

Nevi yang merupakan istri dari Gubernur Sumbar dua periode (2010-2021) Irwan Prayitno menegaskan ekonomi kerakyatan terutama UMKM adalah tulang punggung kebangkitan ekonomi nasional setelah dua tahun hampir negeri ini didera krisis karena pandemi covid-19.

"UMKM di Sumbar bertahan dan siap bangkit, karena karakter orang Minang itu semakin kritis maka semakin kreatif mereka untuk survive dan bangkit, terima kasih Padek, anugerah ini saya peruntukan kepada seluruh pelaku UMKM di Sumbar," ujar Nevi.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Ini surprise bulan pertama di 2022. Terus terang penghargaan Padek ini makin mencemati saya untuk terus lantang berteriak kepada semua komponen pemerintah untuk pro kepada ekonomi kerakyatan seperti UMKM," ujar Nevi Minggu (23/01/2022).

Arteria Dahlan Minta Kajati Berbahasa Sunda Ditindak Tegas, Ledia Hanifa: 'Meuni Lebay Kitu' !

KUTIPAN

Jakarta (20/01) --- Heboh ungkapan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI yang meminta salah satu Kajati ditindak tegas dengan diganti atau bisa diartikan diberhentikan karena berbahasa Sunda saat rapat telah menuai polemik dan kritik.

Termasuk dari sesama Anggota DPR RI. Kali ini kritik datang dari Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI.

"Meuni lebay kitu si Oom Arteria Dahlan the... serius kalo kata saya mah, eta teh lebay, berlebihan."

Anggota Dewan dari Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini sangat menyayangkan aksi ucap Arteria yang menurutnya berlebihan bahkan cenderung menyakinkan masyarakat utamanya warga suku Sunda.

Ledia kemudian menjelaskan bahwa kewajiban berbahasa Indonesia memang tercantum di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu

Kebangsaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Ada 14 ranah yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, diantaranya adalah di ranah Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta serta dalam Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan Kepada Instansi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang No 24 Tahun 2009.

"Namun hal ini tentu tidak berarti penggunaan bahasa daerah yang hanya menjadi semacam penguat, penjelas, selipan, bukan penggunaan secara penuh sepanjang acara

menjadi haram mutlak. Ibarat kata jatuhnya jadi 'makruh' saja adanya tambahan-tambahan ungkapan bahasa daerah." Katanya.

Bahkan pada Undang-Undang yang sama di pasal 42 jelas-jelas tercantum penghormatan, penghargaan dan perlindungan negara kepada bahasa daerah dengan menyatakan 'Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia'.

"Jadi bahasa daerah dikembangkan, dilindungi sementara bahasa Indonesia wajib dipakai dalam rapat-rapat resmi, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Kita tetap harus menyosialisasikan, membiasakan hingga kewajiban Undang-Undang ini menjadi sesuatu yang secara otomatis berlaku dalam kegiatan-kegiatan resmi sehari-hari."

Aleg Fraksi PKS ini sendiri



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Jadi bahasa daerah dikembangkan, dilindungi sementara bahasa Indonesia wajib dipakai dalam rapat-rapat resmi, itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Kita tetap harus menyosialisasikan, membiasakan hingga kewajiban Undang-Undang ini menjadi sesuatu yang secara otomatis berlaku dalam kegiatan-kegiatan resmi sehari-hari"

pernah mengingatkan Mendikbudristek yang berulang kali menggunakan ungkapan-ungkapan berbahasa Inggris dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, akhir Januari 2020 lalu.

"Itu kan rapat resmi, maka saya ingatkan Mas Nadiem untuk

berbahasa Indonesia sesuai aturan Undang-Undang. Mungkin karena beliau lama di luar negeri, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris jadi berkali-kali terucut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*





Kunjungi Lokasi Banjir Bandang di Dapil, Iskan: Kita Upayakan Rehab dan Rekonstruksi Kembali

KUTIPAN

Padang Lawas (19/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengunjungi lokasi banjir bandang yang terjadi di Padang Lawas, Sumut.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Iskan menghimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar dan semangat dalam menghadapi musibah ini.

"Kepada seluruh warga Padang Lawas, saya bersama dengan Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu telah meninjau kembali Rumah - Rumah, Bangunan yang rusak ringan hingga berat serta Akses jalan yang rusak. Insya Allah disini kita akan segera merehab dan membangun kembali Rumah Warga yang telah rusak akibat bencana banjir bandang itu, Semoga segera cepat proses pendataannya dan Pemerintah khususnya dari Kementerian Sosial dan BNPB segera dana dapat dicairkan untuk pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang tersebut, dan semoga

dapat cepat membantu untuk pembangunan rumah warga yang terdampak bencana itu," ujar Iskan.

Sementara itu Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi mengapresiasi sikap Pemerintah yang dengan cepat merespon bencana alam banjir bandang yang terjadi di Padang Lawas, Lubu Sutam ini

"Saya berterima kasih kepada H. Iskan Qolba Lubis selaku Anggota DPR RI Fraksi PKS yang mana telah berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah setempat dan juga Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial, BNPB serta TNI/Polri yang membantu berjibaku dalam penanganan bencana di daerah saya ini. Semoga pembangunan Rumah yang telah kita rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik

dan selesai dengan waktu yang cepat. Untuk masyarakat saya harap bersabar kita sama - sama prihatin dengan musibah ini, semoga kita dapat melewati semua ini dengan keikhlasan", Pungkas Ahmad Zarnawi.

Aleg asal Sibuhuan ini juga menambahkan setidaknya ada 560 Rumah Bangunan yang rusak ringan, 62 Rumah Bangunan yang rusak sedang dan 131 Rumah Bangunan yang rusak berat.

"Total data yang saya terima hingga saat ini ada sebanyak 753 Rumah Bangunan warga yang harus segera kita tindak lanjut untuk merehabnya kembali. saya bersama dengan Bupati Padang Lawas telah meninjau langsung dan melihat ke lokasi kejadian bencana banjir bandang itu. Saya berharap juga Pemerintah dapat memberikan Rumah Sementara bagi masyarakat disana sampai proses selesai pembangunan rumah - rumah yang sudah rusak itu, agar mereka semua bisa hidup dengan layak dan nyaman terutama untuk anak-anak sekolah yang mana bisa



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

“Semoga segera cepat proses pendataannya dan Pemerintah khususnya dari Kementerian Sosial dan BNPB segera dana dapat dicairkan untuk pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir badang tersebut, dan semoga dapat cepat membantu untuk pembangunan rumah warga yang terdampak bencana itu”

membuat mereka menjadi lebih fokus kegiatan belajarnya. Bantuan Sosial dari Pemerintah juga segera kita turunkan bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di Padang Lawas," Tegas Iskan.

Lebih lanjut Iskan menuturkan bahwa Syarat

Program BBR (Bantuan Bangunan Rumah) segera masuk proposal kepada Pemerintah agar nantinya dana Bantuan Pembangunan Rumah dapat segera dicairkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Reses, Bukhori Serap Aspirasi Lintas Tokoh di Kota Semarang

KUTIPAN

Semarang (12/01) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori menghadiri kegiatan PKS Mendengar yang diselenggarakan DPD PKS Kota Semarang, Ahad (09/01/2022).

Berlangsung di Poncowati Convention Hall, Hotel Patra Semarang, acara turut dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Muhammad Haris dan sejumlah anggota DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang dari Fraksi PKS.

Sejumlah tokoh dari elemen masyarakat maupun pemerintah juga turut hadir diantaranya Ketua PD Muhammadiyah Kota Semarang, Ketua BAZNAS Kota Semarang, akademisi, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Bukhori menyampaikan bahwa DNA PKS adalah melayani, sebagaimana termaktub dalam tagline partai dengan wajah barunya, yaitu Bersama Melayani Rakyat.

"Melayani rakyat sudah menjadi DNA PKS yang sudah, sedang, dan in shaa Allah akan

terus kami lakukan. Kami menyadari bahwa partai ini adalah milik umat dan mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Karena itu, pelayanan kami lakukan lintas lini, baik oleh jajaran anggota di legislatif, eksekutif, hingga anggota di akar rumput. Semuanya saling bahu-membahu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Mulai dari amal yang diwujudkan melalui kewenangan atau kebijakan hingga sumbangsih harta, waktu, tenaga, dan pikiran," ucap Bukhori.

Anggota Komisi VIII DPR itu menambahkan, kegiatan PKS Mendengar diselenggarakan untuk menyerap berbagai saran, masukan, dan aspirasi tokoh masyarakat untuk mengembangkan kinerja PKS dalam melayani rakyat.

"PKS Mendengar menyiratkan pesan bahwa PKS tidak ingin bekerja sendiri, bergerak sendiri, atau menang sendiri dalam beramal. Sebagaimana republik ini didirikan oleh anak bangsa dari berbagai latar belakang, maka kami hendak menyerap inspirasi itu. Sebagai partai yang inklusif, kami membuka telinga kami lebar-lebar untuk mendengar masukan yang konstruktif dari berbagai kalangan. Kami membuka tangan kami untuk menyambut berkolaborasi dalam kerja-kerja keumatan. Kami menerima kemajemukan sebagai khazanah yang akan memperkaya horizon kami dalam merealisasikan kerja-kerja politik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama," tuturnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah 1 itu juga membeberkan sejumlah program advokasi dapil meliputi Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal yang berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2021.

Sejumlah program advokasi yang berhasil direalisasikan antara lain bantuan bansos bagi masyarakat rentan selama pandemi; penyaluran 1 juta paket kurban; bantuan operasional pesantren, madrasah, dan TPQ; bantuan tunai guru ngaji; bantuan masker dan APD bagi masyarakat dan nakes; serta bantuan 5 unit ambulans dan 1 unit mobil siaga bencana.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"PKS Mendengar menyiratkan pesan bahwa PKS tidak ingin bekerja sendiri, bergerak sendiri, atau menang sendiri dalam beramal. Sebagaimana republik ini didirikan oleh anak bangsa dari berbagai latar belakang, maka kami hendak menyerap inspirasi itu. Sebagai partai yang inklusif, kami membuka telinga kami lebar-lebar untuk mendengar masukan yang konstruktif dari berbagai kalangan. Kami membuka tangan kami untuk menyambut berkolaborasi dalam kerja-kerja keumatan"



Syaikhu Serahkan Ambulans Warga RW 16 Taman Kebalen Indah

KUTIPAN

Kabupaten Bekasi (22/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan ke Taman Kebalen Indah Babelan, Kabupaten Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Syaikhu menyerahkan satu unit bantuan ambulans untuk warga RW 16.

"Semoga itu dapat memberikan banyak manfaat bagi warga di Taman Kebalen Indah dan sekitarnya," ujar Syaikhu.

Menurut Syaikhu, permintaan bantuan ambulans ini disampaikan sekitar November lalu.

"Ya ini diminta saat saya ke sini acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada November tahun lalu. Alhamdulillah sekarang bisa terpenuhi," ungkap Syaikhu.

Ucapan terimakasih disampaikan oleh Ketua RW 16 Muhammad Rahman.

"Terimakasih Pak Kiai Syaikhu atas bantuannya. Ini pasti sangat bermanfaat buat kami," kata Rahman.

Ketua PAKAM (Paguyuban Rukun Kematian) Taman Kebalen dan Vila Mutiara Gading Tiga Nurul Nugraha juga mengucapkan hal serupa.

"Saya benar-benar tidak menyangka secepat ini dapat ambulans. Terimakasih Pak Ustadz Ahmad Syaikhu," ucap dia.

Pada acara itu, Syaikhu juga mendengar dan menyerap aspirasi warga.

"Aspirasi mereka beragam, dari mulai gedung posyandu hingga jalanan rusak," ucap Syaikhu, Sabtu (15/01/2022).

Kegiatan ini dilakukan Syaikhu dalam rangka Kunjungan Dapil (Kundapil) yang berlangsung dari 14-16 Januari.



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Semoga itu dapat memberikan banyak manfaat bagi warga di Taman Kebalen Indah dan sekitarnya. Ya ini diminta saat saya ke sini acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada November tahun lalu. Alhamdulillah sekarang bisa terpenuhi.





Masa Reses, Nur Azizah Kunjungi Rumah Warga Penerima Bantuan Rehabsos RTLH di Depok

KUTIPAN

Depok - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. meninjau lokasi penerima bantuan Rehabsos RTLH Kemensos di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Depok

Bantuan Rehabsos RTLH ini merupakan bantuan yang disalurkan melalui Nur Azizah selaku Anggota Komisi VIII DPR RI untuk masyarakat di Dapil yang membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah serta pemberdayaan ekonomi.

Di akhir tahun 2021, Nur Azizah telah menyalurkan bantuan bagi 100 warga di Kota Depok dan Kota Bekasi sebanyak 100 rumah. 80 diantaranya di Kota Depok dan sisanya di Kota Bekasi. Total dana yang telah di gelontorkan senilai 2 Milyar Rupiah yang bersumber dari dana APBN yang di gelontorkan melalui Kemensos RI. Dimana masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan

dana sebanyak 20 juta rupiah.

Selain bantuan rehab rumah, para KPM juga akan mendapatkan pembinaan ekonomi, untuk menunjang kemandirian perekonomiannya. Menurut Nur Azizah program Rehabsos RTLH ini bagus, karena tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, namun juga tetap ada pembinaan bagi para KPM agar dapat berekonomi secara mandiri. Tentu program ini harus lebih banyak lagi, agar tidak hanya 100 KPM saja yang dapat merasakan manfaatnya" papar Nur Azizah.

Pada kesempatan ini turut hadir, Darmawansyah selaku Lurah di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota

Depok. Darmawansyah mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas bantuan yang telah disalurkan Nur Azizah kepadaarganya di Kelurahan Mampang.

"Kita di kelurahan mampang ini mempunyai 16 RW dan 83 RT dengan jumlah penduduk 26.182 jiwa dengan KK 11.123. Alhamdulillah dengan perbaikan rumah tinggal ini yang memang sebelumnya tidak nyaman, Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sekarang lebih nyaman. Insha Allah setelah finishing akan menjadi sangat nyaman. Terimakasih kepada ibu Nur Azizah atas perhatiannya", jelas Darmawansyah.

Sementara itu, Khairul Wajidi, Ketua DPC PKS Pancoran MAS, menyebutkan saat ini di Kelurahan mampang ada 10 titik dari total 100 KPM yang menerima bantuan. "Jadi di kelurahan mampang ini yang paling banyak. Alhamdulillah kita bisa negosiasi 10% di Mampang. Saat ini pembangunan sudah ada yang 90%, 80% dan paling sedikit 40%. Dan untuk



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Program Rehabsos RTLH ini bagus, karena tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, namun juga tetap ada pembinaan bagi para KPM agar dapat berekonomi secara mandiri. Tentu program ini harus lebih banyak lagi, agar tidak hanya 100 KPM saja yang dapat merasakan manfaatnya"

bantuan dari pusat ini berbeda dengan yang di kota yang harus selesai dalam 2 minggu, kalau yang dari pusat ini cukup lama, hingga 2 bulan. Jadi kami masih ada waktu untuk menyelesaikan kewajiban ini dengan optimal, tidak terburu-buru", papar Khairul. Ungkapan terimakasih juga

datang dari tokoh masyarakat di RW 12, Taufik yang merupakan Ketua RW, bersyukur atas perhatian yang diberikan Nur Azizah dan kader-kader PKS terhadap warga di RW 012.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dampingi Menteri PUPR, Suryadi Jaya Purnama Tinjau Bendungan Bintang Bano di NTB

KUTIPAN

Lombok (14/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama bersama Menteri PUPR, M. Basoeki Hadimoeljono meninjau Persiapan Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat.

Selain meninjau Bendungan Bintang Bano kedatangan Menteri PUPR ke NTB juga dalam rangka meninjau kesiapan Infrastruktur Jalan Baypass Mandalika, Rabu (12/01/2022).

Dalam kesempatan tersebut pria yang akrab disapa SJP ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementerian PUPR dan Presiden Jokowi yang berkomitmen untuk menyelesaikan program-program Pemerintah Pusat di NTB.

"Kita berterimakasih kepada bapak Menteri, kepada presiden Joko Widodo juga, banyak sekali program infrastruktur di daerah kita Insya Allah saya akan membantu mensukseskan program di Nusa Tenggara

Barat," ucapnya.

Menteri PUPR juga mengucapkan terimakasih kepada SJP atas dukungannya sebagai Anggota Komisi V DPR RI, karena dukungannya menentukan keberhasilan program-program Kementerian PUPR yang ada di Lombok.

"Ditemani Pak Suryadi kami meninjau persiapan Bendungan Bintang Bano dan juga sorenya meninjau mandalika dari segi kesiapan bidang Infrastruktur" ucap Menteri PUPR M. Basoeki Hadimoeljono.

Setelah meninjau Bendungan Bintang Bano tersebut, SJP bersama Menteri PUPR langsung meninjau kesiapan dan progres infras-

struktur Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok-Mandalika.

Selain infrastruktur jalan Bypass-Mandalika, beberapa titik sepanjang jalan Baypass juga menjadi perhatian Menteri PUPR bersama SJP diantaranya dimulai dari Bundaran BIL kemudian di teruskan ke Jalan Bypass BIL-Mandalika, Bundaran Sunggung, Pelebaran Jalan Kuta-Keruak, Kawasan Sirkuit Mandalika dan Home Stay/Sarhunta (Sarana Hunian Sementara) yang ada di seputaran Mandalika.

Dalam meninjau kesiapan infrastruktur jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika, Menteri PUPR juga didampingi Gubernur NTB, Zulkiefilmansyah.



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Kita berterimakasih kepada bapak Menteri, kepada presiden Joko Widodo juga, banyak sekali program infrastruktur di daerah kita Insya Allah saya akan membantu mensukseskan program di Nusa Tenggara Barat"



Nasir Djamil Tanggapi Kasus Warga Aceh Dirampok Ulah Banpol Di Gebang

KUTIPAN

Jakarta (21/01) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil menanggapi kejadian perampokan dengan modus razia di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang menimpa warga Aceh di Jalan lintas Nasional Medan – Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Gebang Polsek Langkat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 15 Januari 2022 saat korban dalam perjalanan dari Aceh menuju Medan.

Berdasarkan keterangan yang dimuat di media dikatakan bahwa Suhelmi (26), warga Lhoseumawe Aceh didatangi sekelompok orang diduga Polisi (karena menggunakan Atribut Polisi) yang tiba-tiba masuk ke dalam minibus yang ditumpungnya dan memaksa korban untuk membuka sandi handphonenya, seketika pelaku melakukan pengecekan tanpa izin dan menjarah seluruh isi kantong korban dengan total uang senilai Rp 7,8 Juta. Dugaan kuat bahwa tindakan pemerasan ini dibekingi oleh

oknum polisi setempat.

“Saya menghimbau kepada anggota kepolisian yang bertugas hendaknya mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Jauhi sikap premanisme dan sikap keras yang berlebihan. Kejadian ini merupakan bentuk penyimpangan yang harusnya tidak boleh terjadi saat anggota dalam sebuah wawancara pada Kamis, 20 Januari 2022 di ruang sidang Komisi III DPR RI.

Nasir menilai, arogansi dalam pelayanan secara terus-menerus akan semakin memperkuat persepsi masyarakat yang kurang bagus

terhadap citra dan profesionalisme institusi Polri.

“Perbuatan oknum yang arogan dapat merusak (wajah) satu institusi, tentu ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Tolong Pak Kapolres ditangani dengan baik peristiwa perampokan yang menimpa warga Aceh tersebut. Saya mendengar bahwa korban sudah melaporkan kejadian itu ke Propam dan SPKT Polres Langkat,” kata Nasir.

Karena itu, Nasir akan terus memantau perkembangan dari penguatan kejadian itu dan mengupayakan komunikasi ke Polsek setempat.

Menurutnya, polisi mempunyai tugas mulia yaitu mengayomi dan melayani masyarakat, untuk itu perlu penjelasan dari pihak Polsek Langkat sebagai pertanggungjawabannya mengenai peristiwa perampokan yang berkedok razia ini.

Tentu peristiwa ini mendapat perhatian serius masyarakat khususnya bagi warga Aceh yang melakukan perjalanan ke Sumatera Utara via darat.

Yang dibutuhkan saat ini ungkap politisi asal Aceh adalah kerjasama yang baik pihak ke-



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

“Semua kita sama di mata hukum, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku terhadap pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi tenang dalam melakukan perjalanan tanpa dibayangi ketakutan akan peristiwa serupa”

polisian untuk melakukan penyelidikan lebih jauh dan dapat ditindak oknum yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

la pun berharap, pihak kepolisian bisa menuntaskan masalah ini dengan pendalaman apakah adanya unsur kesengajaan dan pembiaran di lapangan. Jika terbukti ada peran keseriusan untuk bertindak tegas terhadap

oknum untuk mengayangi kecemasan masyarakat.

“Semua kita sama di mata hukum, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku terhadap pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi tenang dalam melakukan perjalanan tanpa dibayangi ketakutan akan peristiwa serupa,” tutup Nasir.



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



RS Swasta Adukan Tunggakan Hingga Miliaran, F-PKS: Pemerintah **Harus** **Prioritaskan** Tunaikan Kewajiban

KUTIPAN

Jakarta (19/01) — Fraksi PKS menerima aspirasi dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) terkait Penagihan Pelayanan Claim Covid 19 Tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh pemerintah.

Perwakilan ARSSI yang dipimpin Sekretaris Jenderal ARSSI Ling Ichsan Hanafi langsung diterima oleh Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, Netty Prasetyani dan Alifudin, Selasa (18/01/2022).

Ichsan memaparkan perjuangan ARSSI untuk memperjuangkan penagihan pelayanan klaim Covid-19 Tahun 2020 sudah dilakukan dengan mengirim surat resmi ke berbagai instansi antara lain Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK dan Kemenko Marvest.

"Namun tidak ada hasil yang memuaskan, alhamdulillah hari ini kami langsung diterima oleh Fraksi

PKS. Respons Fraksi PKS sangat membahagiakan, mudah-mudahan ini bisa menemui titik terang. Kami RS sudah berjuang memberikan pelayanan kepada pasien kenyataannya kami mengalami hambatan klaim untuk pasien Covid-19 yang ditangani RS Swasta," ujar Ichsan.

Ichsan melaporkan, berdasarkan data yang dihimpun ARSSI setidaknya ada tunggakan Rp385.486.388.446 yang akhirnya masuk klaim

kadaluarsa karena berbagai hal. Ia yakin jumlah ini akan terus meningkat karena belum menghitung tunggakan di RS milik pemerintah sendiri atau

RS Swasta lain.

Ichsan mengaku klaim yang disebut kadaluarsa itu terjadi bukan karena RS tidak ingin menyelesaikan kewajiban pelaporan dalam waktu 14 hari. Namun, ia merinci setidaknya ada 7 penyebab klaim masuk ke status kadaluarsa yang disebabkan hal-hal di luar kuasa RS.

"61,6 persen paling banyak karena ada mispersepsi soal regulasi. Mohon maaf regulasi dari pemerintah ini sangat cepat berubah ada yang bentuknya KMK ada yang Surat Edaran sehingga kami yang di lapangan kebingungan," papar dia.

Penyebab lain karena faktor teknis aplikasi yang sedang maintenance sehingga RS tidak dapat mengirimkan klaim. Ia juga menyebut ada 15,2 persen disebabkan BPJS Kesehatan mengirimkan BAHV di luar jam kerja.

"Dikirim di luar jam kerja tapi Sabtu-Minggu dihitung oleh BPJS dalam durasi 14 hari paling lambat mengirim klaim," ungkap dia.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

“Tunggakan pembayaran ke RS dari pemerintah akan berdampak negatif karena akan memengaruhi kesiapan RS dalam melayani tindakan medis. Apalagi sekarang Omicron data rawat inap di RS kembali meningkat, kita saya akan langsung sampaikan ke Menteri Kesehatan dalam RDP dengan Komisi IX sekarang. Intinya kita minta kewajiban negara ke RS Swasta ditunaikan

Ia juga menyebut faktor lainnya karena karyawan dan petugas RS banyak yang terpapar Covid-19 sehingga harus melakukan isolasi ataupun mendapat perawatan. Padahal, papar dia, waktu

klaim untuk tahun 2020 terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus yang merupakan puncak penyebaran varian Delta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hasil Musyawarah Majelis Syura VI, PKS Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

KUTIPAN

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidensial Treshold 20 persen, serta membuka diri dalam Koalisi Pemilu 2024.

Jakarta (13/01) — Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VI di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/01).

Dalam konferensi pers, Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri menyampaikan tiga poin hasil sidang MMS ke VI, diantaranya penolakan penundaan Pemilu 2024.

"PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945," tutur Salim.

Ia juga mengatakan PKS menyuarakan agar para elit

politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat Reformasi.

"PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat Demokrasi dan semangat Reformasi 1998," ucap Salim.

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidensial Treshold 20 persen, serta membuka diri dalam Koalisi Pemilu 2024.

"PKS mendukung Judicial

Review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional," terang Dr. Salim.

"PKS akan membuka diri dan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik dan para tokoh bangsa untuk membangun titik temu dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memiliki karakter nasionalis, religius, berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan demokrasi, sumber daya alam, pangan, energi dan ekonomi, serta tidak tunduk terhadap kepentingan pihak asing, mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sosok negarawan yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dan tidak memecah belah bangsa," pungkas mantan Menteri Sosial di era Kabinet Indonesia Bersatu II itu.



Dr. SALIM
Ketua Majelis Syura PKS

"PKS mendukung Judicial Review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional"





**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***